

**PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN
STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP
TINGKAT KEPATUHAN *MANDATORY DISCLOSURE*
(Studi Empiris Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar
Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2015)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh :
AMIDA DHESTIANA MUSAFFA
13812141022

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JURUSAN PENDIDIKAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2017**

**PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN
STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP
TINGKAT KEPATUHAN *MANDATORY DISCLOSURE*
(Studi Empiris Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar
Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2015)**

SKRIPSI

Oleh:
Amida Dhestiana Musaffa
13812141022

Telah disetujui dan disahkan pada tanggal 6 Juni 2017
Untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi
Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta

Disetujui

Dosen Pembimbing



Prof. Sukirno, M.Si., Ph.D.
NIP. 19690414 199403 1 002

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul:

**PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN
STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP
TINGKAT KEPATUHAN *MANDATORY DISCLOSURE*
(Studi Empiris Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar
Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2015)**

Oleh:

AMIDA DHESTIANA MUSAFFA
13812141022

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 20 Juni 2017

dan dinyatakan telah lulus

DEWAN PENGUJI

Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Dra. Sukanti, M.Pd	Ketua Penguji		11-07-2017
Prof. Sukirno, M.Si., Ph.D.	Sekretaris		11-07-2017
Mimin Nur Aisyah, M.Sc., Ak	Penguji Utama		7-07-2017

Yogyakarta, 12 Juli 2017
Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta
Dekan,



Dr. Sugiharsono, M.Si
NIP. 19950328 198303 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Amida Dhestiana Musaffa
NIM : 13812141022
Program Studi : Akuntansi S1
Fakultas : Ekonomi
Judul Skripsi : Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Struktur
Kepemilikan terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* (Studi Empiris Perusahaan Perbankan Yang
Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2015)

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri.
S sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau
diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan tata penulisan
karya ilmiah yang lazim.

Yogyakarta, 5 Juni 2017

Penulis,



Amida Dhestiana Musaffa

NIM. 13812141022

MOTTO

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”

(Q.S Al-Mujadillah: 11)

“Barangsiapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah untuk dirinya sendiri”

(Q.S Al-Ankabut 29: 6)

“Strength does not come from physical capacity. It comes from an indomitable will”

(Mahatma Gandhi)

PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji syukur Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Ibu Yamanah, sosok malaikat tanpa sayapku. Terima kasih atas doa yang selalu engkau panjatkan di setiap sujudmu serta senantiasa selalu memberi dukungan, semangat dan motivasi yang terbaik.
2. Bapak Sukardi, sosok pahlawanku. Terima kasih atas setiap tetes keringat yang telah engkau korbakan untukku. Semoga anakmu ini kelak dapat membahagiakan dan membanggakanmu.
3. Keluarga besar Wiryorejo yang senantiasa mendoakan dari jauh.

BINGKISAN

Kubingkiskan pula untuk Yasfin Refliana Musaffa, adik tercintaku yang selalu mendukung dan mendoakanku.

**PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN
STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP
TINGKAT KEPATUHAN *MANDATORY DISCLOSURE*
(Studi Empiris Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar
Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2015)**

Oleh:

Amida Dhestiana Musaffa

13812141022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh tata kelola perusahaan terhadap tingkat kepatuhan *Mandatory Disclosure*; dan (2) Pengaruh struktur kepemilikan terhadap tingkat kepatuhan *Mandatory Disclosure*.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode pengumpulan data dokumentasi. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari laporan keuangan perusahaan sektor perbankan di BEI periode 2010-2015 melalui situs www.idx.co.id. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*, ditunjukkan dengan *p-value* signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,747 > 1,66792$); (2) jumlah anggota komite audit berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*, ditunjukkan dengan *p-value* signifikan sebesar $0,002 < 0,05$ dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,3150 > 1,66792$); (3) kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*, ditunjukkan dengan *p-value* signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,677 > 1,66792$); dan (4) kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*, ditunjukkan dengan *p-value* signifikan sebesar $0,316 > 0,05$ dan $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,009 < 1,66792$).

Kata Kunci: Dewan Komisaris, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, *Mandatory Disclosure*.

**THE EFFECT OF CORPORATE GOVERNANCE AND
OWNERSHIP STRUCTURE ON COMPLIANCE LEVEL OF
MANDATORY DISCLOSURE**
*(Empirical Study of The Listed Banking Corporation
In Indonesia Stock Exchange Period 2010-2015)*

By:
Amida Dhestiana Musaffa
13812141022

ABSTRACT

The purposes of this research is to investigate: (1) the effect of corporate governance on compliance level of Mandatory Disclosure; and (2) the effect of ownership structure on compliance level of Mandatory Disclosure.

Data were collected by documentation. It was secondary data derived from company financial reports of the banking sector in BEI period 2010-2015 was through the site of www.idx.co.id. The sampling technique used purposive sampling. The analysis technique used was quantitative analysis.

The results of this research show that: (1) total members of the board of commissioners has an effect on the compliance level of mandatory disclosure, indicated by significant p-value $0.000 < 0.05$ and $t_{count} > t_{table}$ ($3.747 > 1.66792$); (2) total member of audit committee has an effect on the compliance level of mandatory disclosure, indicated by significant p-value $0.002 < 0.05$ and $t_{count} > t_{table}$ ($3.3150 > 1.66792$); (3) managerial ownership has an effect on the compliance level of mandatory disclosure, indicated by significant p-value $0.000 < 0.05$ and $t_{count} > t_{table}$ ($3.677 > 1.66792$); and (4) institutional ownership doesn't effect on the compliance level of mandatory disclosure, indicated by significant p-value $0.316 > 0.05$ and $t_{count} < t_{table}$ ($1.009 < 1.66792$).

Keywords: *Board of Commissioners, Audit Committee, Managerial Ownership, Institutional Ownership, Mandatory Disclosure.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul "Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Struktur Kepemilikan terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure*". Tugas Akhir Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta,

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, arahan dan dukungan dari berbagai pihak Tugas Akhir Skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd., Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Dr. Sugiharsono, M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
3. RR Indah Mustikawati, M.Si., Ak., Ketua Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
4. Dr. Denies Priantinah, M.Si., Ak., CA., Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
5. Prof. Sukirno, M.Si., Ph.D., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan dengan sabar memberikan dukungan, saran, serta pengarahan selama penyusunan Tugas Akhir Skripsi.

6. Ibu Mimin Nur Aisyah, M.Sc., Ak., Dosen Narasumber yang telah memberikan masukan, saran serta membimbing penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi ini.
7. Segenap dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menimba ilmu di kampus tercinta.
8. Intan, Jeni, Septi, Indi dan Anggun, terima kasih telah menjadi sahabat terbaik dan selalu bareng-bareng selama 4 tahun, serta terima kasih telah mau menjadi tempat keluh kesah selama ini.
9. Keluarga Akuntansi A 2013, terima kasih telah menemani selama 4 tahun ini.
See you on top.
10. Keluarga KKN 21 ND, Karlin, Erfi, Ikhsan, Eris, Nando dan semuanya yang senantiasa memberikan semangat dukungan dan doanya.
11. Personil kos Santoso, Ema, Mala dan Umi yang selalu memberi semangat dan menemani begadang untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi.
12. Rahma, sepupu yang selalu memberi nasihat untuk terus semangat menyelesaikan tugas akhir skripsi.
13. Mulia, Widya, Nanda, Eva, Dita, Oyil dan juga Sipta yang selalu memberi semangat serta menemani menyelesaikan tugas akhir skripsi.
14. Tina dan Siwi yang selalu menghibur serta selalu memberi dukungan pada setiap hal yang akan dilakukan serta memberikan nasihatnya untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini.

15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan dorongan serta bantuan selama penyusunan Tugas Akhir Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna menyempurnakan Tugas Akhir Skripsi ini. Penulis berharap semoga penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin.

Yogyakarta, 5 Juni 2017

Penulis,



Amida Dhestiana Musaffa

NIM. 13812141022

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Pembatasan Masalah	10
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian	12
F. Manfaat Penelitian	13
BAB II KAJIAN TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS	15
A. Kajian Teori	15

1. Teori <i>Stakeholders</i>	15
2. Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	16
3. Pengungkapan Wajib (<i>Mandatory Disclosure</i>).....	18
4. Faktor yang Mempengaruhi <i>Mandatory Disclosure</i>	20
a. Jumlah Anggota Dewan Komisaris.....	21
b. Jumlah Anggota Komite Audit	21
c. Proporsi Komisaris Independen	21
d. Kepemilikan Manajerial.....	21
e. Kepemilikan Institusional	22
f. Kepemilikan Asing.....	22
g. Ukuran Perusahaan.....	22
5. <i>Corporate Governance</i>	23
a. Pengertian <i>Corporate Governance</i>	23
b. Macam-macam <i>Corporate Governance</i>	26
6. Struktur Kepemilikan	29
a. Pengertian Struktur Kepemilikan	29
b. Macam-macam Struktur Kepemilikan	30
B. Penelitian yang Relevan	32
C. Kerangka Berpikir	36
D. Paradigma Penelitian.....	42
E. Hipotesis Penelitian.....	43
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Desain Penelitian.....	44

B. Tempat dan Waktu Penelitian	44
C. Desain Operasional Variabel	45
D. Populasi.....	48
E. Sampel.....	48
F. Teknik Pengumpulan Data.....	49
G. Teknik Analisis Data.....	50
1. Analisis Deskriptif	50
2. Uji Asumsi Klasik.....	50
a. Uji Normalitas.....	50
b. Uji Multikoleniaritas	51
c. Uji Autokorelasi	52
d. Uji Heteroskedastisitas.....	53
3. Uji Hipotesis	54
a. Uji Nilai t	54
b. Uji Nilai F	55
c. Uji Koefisien Determinasi (<i>Adjusted R²</i>).....	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Deskripsi Data Penelitian.....	57
B. Hasil Penelitian	58
1. Analisis Statistik Deskriptif	58
2. Uji Asumsi Klasik.....	62
a. Uji Normalitas	62
b. Uji Multikoleniaritas	63

c. Uji Autokorelasi	64
d. Uji Heteroskedastisitas	65
3. Pengujian Hipotesis.....	66
C. Pembahasan Hasil Penelitian	71
D. Keterbatasan Penelitian	79
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pemilihan Populasi dan Sampel.....	57
Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	58
Tabel 3. Tingkat Kecenderungan <i>Mandatory Disclosure</i>	59
Tabel 4. Tingkat Kecenderungan Jumlah Anggota Dewan Komisaris	59
Tabel 5. Tingkat Kecenderungan Jumlah Anggota Komite Audit.....	60
Tabel 6. Tingkat Kecenderungan Kepemilikan Manajerial.....	61
Tabel 8. Tingkat Kecenderungan Kepemilikan Institusional.....	62
Tabel 9. Hasil Uji Normalitas.....	63
Tabel 10. Hasil Uji Multikoleniaritas.....	64
Tabel 11. Hasil Uji Autokorelasi.....	65
Tabel 12. Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	65
Tabel 13. Hasil Uji Hipotesis	66
Tabel 14. Hasil Uji Analisis Linier Berganda.....	69
Tabel 15. Hasil Uji Nilai R^2	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Paradigma Penelitian.....	42
-------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Populasi Penelitian.....	94
2. Daftar Sampel Penelitian.....	96
3. Variabel Independen	97
4. Perhitungan Tingkat Kepatuhan <i>Mandatory Disclosure</i>	99
5. Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	159
6. Hasil Uji Multikolinearitas.....	159
7. Hasil Uji Normalitas.....	159
8. Hasil Uji Autokorelasi.....	160
9. Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	160
10. Hasil Uji t.....	161
11. Hasil Uji F.....	161
12. Hasil Uji Koefisien (R^2).....	162
13. Daftar Item Checklist BAPEPAM.....	163

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi saat ini menuntut adanya suatu sistem akuntansi internasional yang berlaku secara internasional di setiap negara dan diterapkan di perusahaan agar dapat menghasilkan informasi keuangan yang dapat diperbandingkan. Perlu adanya peraturan yang diterapkan di perusahaan mengenai pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) untuk melindungi kepentingan *stakeholders* karena tanpa adanya peraturan ini dapat membuat perusahaan menyembunyikan informasi penting yang seharusnya diungkapkan dalam laporan keuangan. Manajemen sebagai sumber pembuatan laporan keuangan memiliki peluang yang besar untuk menyembunyikan informasi dari investor demi kepentingan pribadi seperti bonus dan insentif.

Beberapa tahun terakhir, pengungkapan dan transparansi dalam laporan keuangan menjadi isu penting di Indonesia. *Forum for corporate governance in Indonesia* (FCGI, 2006) mempublikasikan sebuah survey yang dilakukan *Princewaterhouse and Coopers* pada tahun 1999 terhadap investor-investor internasional di Asia yang menunjukkan bahwa Indonesia dinilai sebagai salah satu yang terendah dalam bidang standar pengungkapan dan transparansi. Pengungkapan memberikan implikasi bahwa keterbukaan merupakan basis kepercayaan publik terhadap manajemen di dalam setiap korporasi. Pengungkapan adalah cara yang

efektif untuk mempublikasikan informasi terkait kondisi perusahaan kepada para *stakeholder*. Laporan keuangan yang diungkapkan tersebut diharapkan mampu memberikan informasi kepada investor dan kreditor dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan investasi dana yang mereka kontribusikan untuk perusahaan. Untuk itu *stakeholders* menginginkan pengungkapan yang transparan dalam laporan keuangan.

Pengungkapan menurut Evans (2003) dalam Soewardjono (2005:578) adalah penyediaan informasi dalam statemen keuangan, catatan atas statemen keuangan dan pengungkapan tambahan berkaitan dengan statemen keuangan. Terdapat dua sifat pengungkapan, yaitu pengungkapan yang didasarkan pada ketentuan (*required/regulated/mandatory disclosure*) dan pengungkapan yang bersifat sukarela (*voluntary discosure*) (Suhardjanto, 2012)

Pengungkapan wajib (*Mandatory disclosure*) di Indonesia telah diatur oleh Bapepam-LK melalui kepatuhan ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Kuangan nomor: Kep-43/BI/2012 tentang penyampaian laporan tahunan emiten atau perusahaan public. Selain itu item-item pengungkapan wajib secara terperinci juga diatur dalam SAK Konvergensi IFRS. Dengan adanya peraturan tersebut, maka seharusnya tingkat pengungkapan wajib di Indonesia mencapai tingkat yang ideal yakni 100 %. Namun penerapan peraturan tersebut nyatanya belum mampu menjamin terlaksananya praktek pengungkapan yang lebih tinggi. Hasil tersebut terbukti dengan hasil peneliti Utami *et al* (2012) yang menemukan

bahwa tingkat kepatuhan pengungkapan wajib di Indonesia baru mencapai 72,203 %.

Mandatory disclosure bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan, memastikan pengendalian kualitas kinerja melalui ketaatan terhadap hukum dan standar akuntansi yang berlaku (Adina dan Ion, 2008), memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kesehatan keuangan perusahaan dan menghitung beban masa depan sehingga investor dapat menentukan kesempatan pertumbuhan jangka panjang dan memperkirakan aliran kas keluar untuk suatu bisnis (Al Akra et al., 2010).

Mandatory disclosure sangatlah penting, karena semakin luas atau semakin banyak laporan keuangan yang diungkapkan, maka perusahaan akan dipandang berkualitas baik. Perusahaan harus mampu memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh semua pihak untuk dapat mencapai target dan mempertahankan kesuksesan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus menyajikan laporan keuangan yang relevan untuk membuat keputusan dengan adanya informasi yang diungkapkan. Kebutuhan pihak eksternal akan informasi keuangan perusahaan membuat tingkat kepentingan informasi keuangan tersebut meningkat. Pengungkapan dan transparan dalam laporan keuangan juga akan menambah nilai bagi para *stakeholders*. Jika tidak ada pengungkapan yang memadai, para *stakeholders* tidak dapat meyakini bahwa kegiatan pengelolaan perusahaan

oleh manajemen dilakukan dengan cara bijaksana dan hati-hati untuk kepentingan mereka.

Penerapan standar akuntansi saja belum cukup untuk mencegah adanya manipulasi laporan keuangan pada perusahaan yang dilakukan oleh manajemen, sehingga diperlukan *corporate governance* untuk mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan. Berbagai perusahaan di Indonesia yang semakin berkembang masih banyak menghadapi masalah-masalah yang apabila diamati, penyebabnya adalah lemah dan tidak diterapkannya *corporate governance* dengan baik. Tidak transparannya praktik dan pengelolaan suatu perusahaan mengakibatkan otoritas moneter sulit mendeteksi praktik kecurangan yang dilakukan oleh pengurus dan pejabat perusahaan (Sitompul, 2006 dalam Venny, Rudi, dan Fara, 2011).

Perusahaan perbankan merupakan industri penting dan memiliki banyak resiko dalam menjalankan aktivitas operasinya dibandingkan dengan perusahaan manufaktur ataupun perusahaan lainnya, sehingga diperlukan transparansi agar aktivitas operasi dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan menghindari kecurangan (M Hafiz et.al, 2015). Untuk meyakini perusahaan melakukan pengungkapan sesuai aturan, perlu dukungan mekanisme *corporate governance* atau Tata Kelola Perusahaan yang telah dikenal sebagai suatu sistem pengawasan dan pengelolaan perusahaan. *CG* didefinisikan sebagai proses, struktur yang digunakan baik oleh pemegang saham, komisaris dan direksi dalam upaya meningkatkan usaha dan akuntabilitas perusahaan untuk mewujudkan nilai pemegang

saham jangka panjang tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholder* lainnya, yang dilandasi oleh peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika (Sutedi, 2012). Menurut Bank Indonesia selain memenuhi peraturan pengungkapan yang dikeluarkan oleh Bank BI, bank juga harus memenuhi pengungkapan dalam peraturan Bapepam L-K dan standar akuntansi.

Pada industri perbankan pernah terjadi beberapa kasus ketidakpatuhan dalam *mandatory disclosure*. Deutsche Bank menjadi salah satu Bank yang melakukan manipulasi, dimana dalam perolehan labanya sepanjang kuartal I/2015 tergerus cukup dalam setelah perseroan tersandung denda jutaan euro karena manipulasi tingkat suku bunga pinjaman. Pendapatan total bank raksasa asal Eropa itu melonjak 24 % secara *year on year* menjadi 10,4 miliar euro, laba bersih perusahaan justru turun menjadi 559 euro atau setara dengan US\$ 608 juta (<http://finansial.bisnis.com/read/20150427/90/427458/deutsche-bank-tersandung-kasus-manipulasi-suku-bunga-laba-anjlok> diakses 30 Januari 2017). Selain itu, Bank Lippo juga salah satu perusahaan perbankan di Indonesia yang tidak transparan dalam mengungkapkan laba perusahaan. Bank Lippo terbukti mengeluarkan tiga laporan keuangan yang berbeda pada tahun 2003. Kasus bank Lippo menjadi contoh keengganan perbankan mengungkapkan besarnya laba yang diperoleh perusahaan yang merupakan bagian dari *mandatory disclosure*. Manipulasi laporan keuangan tersebut disebabkan karena gagalnya pelaksanaan *corporate governance*. Hal tersebut patut disayangkan, karena fungsi dari *corporate governance*

sebagai alat control yang menciptakan *check and balance* gagal dilaksanakann. Kasus lain yang pernah terjadi yaitu kasus pembekuan usahan Bank Global tahun 2004, kasus L/C (*letter of credit*) fiktif Bank BNI tahun 2006 dan kasus Bank Century pada tahun 2008. Kasus tersebut membuat investor lebih memperhatikan pengungkapan informasi perusahaan yang bersifat wajib (*mandatory disclosure*).

Penelitian yang dilakukan oleh Clemente dan Labat (2005) menyebutkan bahwa *corporate governance* mempengaruhi pengungkapan. Menurut *Forum Corporate Governance in Indonesia* (2001), inti *corporate governance* di Indonesia adalah pada dewan komisaris, sehingga struktur *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah dewan komisaris, termasuk komite yang berada di bawah dewan komisaris yaitu komite audit. Dewan komisaris berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap manajerial. Jumlah dewan komisaris yang banyak, akan meminimalkan tingkat kecurangan dalam pengungkapan informasi.

Komite audit merupakan bagian integral dari *corporate governance* yang dibebani dengan tanggung jawab pelaporan keuangan dan efektivitas system pengendalian internal (Owolabi dan Dada, 2011). Semakin banyak anggota komite audit independen maka semakin berkualitas pula laporan keuangan yang dihasilkan. Sesuai dengan penelitian Pitasari dan Septiani (2014) menunjukkan bahwa jumlah komite audit memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. Penelitian tersebut juga didukung oleh Gunawan dan Hendrawati (2016) bahwa jumlah komite audit

berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* IFRS. Semakin besar jumlah anggota komite audit, tingkat kecurangan akan semakin kecil dan pengawasan akan semakin lebih meningkat sehingga laporan keuangan menjadi berkualitas.

Al-Akra (2010) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan komisaris dan jumlah anggota komite audit merupakan faktor yang berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan IFRS. Temuan berbeda dihasilkan dalam penelitian Prawinandi *et al.*, (2012) dimana jumlah anggota dewan komisaris dan jumlah anggota komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

Selain adanya mekanisme *Corporate Governance*, menurut Barako (2007) struktur kepemilikan juga mempengaruhi pengungkapan yang dilakukan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Utami *et al* (2012) juga menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* adalah struktur kepemilikan yang ada di sebuah perusahaan. Menurut Gabriella (2011) struktur kepemilikan perusahaan timbul akibat adanya perbandingan jumlah pemilik saham dalam perusahaan. Sebuah perusahaan dapat dimiliki oleh seseorang secara individu, masyarakat luas, pemerintah, pihak asing, maupun orang dalam perusahaan tersebut (manajerial).

Struktur kepemilikan yang berbeda dalam perusahaan akan memberikan pengawasan yang berbeda pula terhadap pengungkapan.

Perbedaan dalam proporsi saham yang dimiliki oleh investor dapat mempengaruhi tingkat kelengkapan pengungkapan oleh perusahaan. Semakin banyak pihak yang butuh informasi tentang perusahaan, maka semakin detail pula pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan. Hal tersebut menyebabkan struktur kepemilikan menjadi faktor yang cukup kuat dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan.

Unsur kepemilikan yang pertama adalah kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen. Kepemilikan oleh manajemen dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham luar dengan manajemen (Jensen dan Meckling, 1976). Struktur kepemilikan selanjutnya adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham pada akhir tahun yang dimiliki oleh lembaga, seperti asuransi, bank atau institusi lain (Beiner *et al.*, 2003). Kepemilikan institusional, umumnya dapat bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan serta pengungkapan informasi keuangan (Boediono, 2005). Dapat disimpulkan semakin besar kepemilikan institusional maka akan meningkatkan kepatuhan pengungkapan informasi keuangan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Eng dan Mak (2003) dalam Probohudono *et al.*, (2013) menyatakan bahwa kepemilikan

manajerial berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan. Penelitian yang dilakukan oleh Rouf dan Harun (2011) hasilnya juga menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Probohudono *et al.*, (2013) dan Juhmani (2013) menemukan tidak adanya pengaruh yang signifikan dari adanya kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Alvionita dan Taqwa (2015) menyatakan kepemilikan institusional pengaruh positif terhadap *mandatory disclosure*. Hal ini berbeda dari penelitian yang dilakukan oleh Wulan (2013) yang menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.

Dengan adanya mekanisme *corporate governance* dalam perusahaan dan struktur kepemilikan yang ada akan mempengaruhi manajemen dalam mengelola perusahaan serta mendorong manajemen untuk melakukan pengungkapan informasi dan transparansi dalam melaporkan keadaan suatu perusahaan.

Berlandaskan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul : “Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Struktur Kepemilikan Terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure*” untuk mengetahui apakah variabel-variabel tersebut dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Tingkat pengungkapan (*mandatory disclosure*) akan informasi yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia belum optimal, ditunjukkan oleh hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan 72,203 % untuk tingkat pengungkapan di Indonesia.
2. Manajemen memanipulasi laporan keuangan demi kepentingan pribadi untuk mendapatkan bonus dan insentif sehingga mengesampingkan kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh *stakeholders*.
3. Munculnya kasus kecurangan terhadap laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan karena tidak transparan dalam mengungkapkan laba perusahaan.
4. Gagalnya pelaksanaan *corporate governance* sebagai alat control yang menyebabkan adanya manipulasi laporan keuangan.
5. Perbedaan dalam proporsi saham yang dimiliki oleh investor mempengaruhi tingkat kelengkapan pengungkapan oleh perusahaan.

C. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini untuk mengetahui tingkat kepatuhan perusahaan, khususnya perusahaan perbankan di Indonesia dalam melakukan pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dalam laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan perusahaan perbankan dikarenakan dalam industri perbankan terdapat regulasi dan

kriteria tertentu dari Bank Sentral yang harus dipenuhi, sehingga diharapkan pemilihan sampel perbankan ini dapat merepresentasikan kondisi perusahaan publik di Indonesia. Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai variabel tata kelola perusahaan yang terdiri dari jumlah anggota dewan komisaris dan jumlah anggota komite audit serta variabel struktur kepemilikan yang terdiri dari kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional, apakah variabel-variabel tersebut berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian - uraian yang telah dikemukakan sebelumnya pada identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka perumusan masalah yang akan dibuat oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh Jumlah Anggota Dewan Komisaris terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI?
2. Apakah terdapat pengaruh Jumlah Anggota Komite Audit terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI?
3. Apakah terdapat pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI?

4. Apakah terdapat pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI?
5. Apakah terdapat pengaruh Jumlah Anggota Dewan Komisaris, Jumlah Anggota Komite Audit, Struktur Kepemilikan, dan Struktur Institusional secara simultan terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini antara lain :

1. Untuk menguji pengaruh Jumlah Anggota Dewan Komisaris terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI
2. Untuk menguji pengaruh Jumlah Anggota Komite Audit terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI
3. Untuk menguji pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI
4. Untuk menguji pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI

5. Untuk menguji pengaruh Jumlah Anggota Dewan Komisaris, Jumlah Anggota Komite Audit, Struktur Kepemilikan, dan Struktur Institusional secara simultan terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI

F. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pembaca dan memberikan kontribusi dalam ilmu bidang Akuntansi terutama mengenai pengaruh *corporate governance* dan struktur kepemilikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan perbandingan dengan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan informasi pada perusahaan khususnya pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat memberi pengetahuan tentang tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*, khususnya *corporate governance* dan struktur kepemilikan yang

dapat digunakan untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan perbankan dalam mengungkapkan *mandatory disclosure*.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan memperluas pengetahuan serta wawasan yang terkait dengan pengaruh *corporate governance* dan struktur kepemilikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Teori *Stakeholders*

Teori *Stakeholders* menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus mampu memberikan manfaat bagi *stakeholders*-nya (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, dan pihak lain). Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan *stakeholders* kepada perusahaan tersebut (Ghozali dan Chariri 2007). Dengan adanya teori *stakeholders*, perusahaan tidaklah bersifat individualis, dan bukan merupakan suatu entitas yang beroperasi untuk kepentingannya sendiri, namun perusahaan juga memberikan manfaat bagi *stakeholders* atau masyarakat luas. Teori *stakeholder* dapat mempengaruhi perusahaan atau entitas untuk mengungkapkan laporan tahunannya secara luas dan transparan, karena dengan adanya teori ini suatu entitas bukanlah suatu bidang usaha yang berdiri sendiri tanpa ada campur tangan pihak lain, tapi masih membutuhkan bantuan dari pihak lain untuk meneruskan kegiatan operasionalnya.

Salah satu strategi yang digunakan perusahaan untuk menjaga hubungan dengan *stakeholders* adalah melakukan pengungkapan informasi mengenai laporan keuangan perusahaan. Dengan adanya

pengungkapan tersebut, diharapkan perusahaan mampu memenuhi kebutuhan informasi bagi para *stakeholders* serta dapat menjaga kelangsungan hidup dari perusahaan karena kelangsungan hidup suatu perusahaan tergantung pada dukungan *stakeholders*.

2. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi merupakan teori yang sering digunakan oleh pengawas keuangan untuk mengetahui hubungan antara karakteristik dewan dengan nilai perusahaan atau pemegang saham (*shareholders*) dengan manajemen. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa teori agensi terkait kontrak antara dua pihak yakni agen dan principal, karena kontrak tersebut akan muncul perilaku oportunistik. Teori keagenan sebagai hubungan kerjasama antara *principal* (pemilik perusahaan) dan *agent* (manajemen perusahaan), dimana principal mendelegasikan wewenang kepada *agent* untuk mengelola perusahaan dan mengambil keputusan. Jika *principal* dan *agent* memaksimalkan kemampuan, maka agent dipercaya tidak akan selalu melakukan yang terbaik untuk kepentingan principal.

Manajemen sebagai pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Manajemen berwenang untuk memberikan keputusan bagi pemegang saham guna memaksimalkan keuntungan pemegang saham, sehingga manajemen harus mampu untuk memberikan tanggungjawab keputusan yang telah diambil kepada pemegang saham. Namun terkadang pihak pemegang

saham memiliki tujuan yang tidak sama dengan manajemen, pemegang saham lebih mengutamakan keuntungan pribadi sedangkan manajemen mengutamakan kesejahteraan pribadi. Manajemen yang lebih mengetahui keadaan perusahaan, lebih memiliki kesempatan melakukan tindak kecurangan dalam pelaporan keuangan (Widjayanti dan Wahidawati, (2015).

Eisenhardt (1989) menyebutkan terdapat 3 sifat dasar dari manusia yaitu: (1) Manusia cenderung lebih memilih menghindari suatu resiko (*risk adverse*), (2) Manusia lebih mementingkan diri sendiri (*self interest*). (3) Manusia cenderung mempunyai daya pikir yang terbatas menyangkut masa depan (*bounded rationally*). Berdasarkan asumsi yang telah disampaikan oleh Eisenhardt (1989), konflik agensi yang sering terjadi antara manajer dengan pemegang saham disebabkan oleh sifat dasar manusia tersebut.

Menurut Herawaty (2008), *corporate governance* yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberi keyakinan kepada investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang mereka investasikan. Tata kelola perusahaan didefinisikan sebagai sistem *checks and balances*, baik internal maupun eksternal perusahaan, yang memastikan bahwa perusahaan melaksanakan akuntabilitas mereka kepada semua pemangku kepentingan mereka dan bertindak dalam cara yang bertanggungjawab secara sosial dalam semua bidang kegiatan

bisnis mereka (Solomon, 2007). Penggunaan teori agensi relevan dengan penelitian ini karena teori agensi menganggap bahwa manusia memiliki banyak peran dalam suatu organisasi. Selain itu, teori agensi berasumsi bahwa pandangan kontraktual dari perilaku manusia dapat memberikan ramalan atau gambaran tentang konsekuensi logis secara tepat.

3. Pengungkapan Wajib (*Mandatory Disclosure*)

Kata *disclosure* memiliki arti tidak menutupi atau menyembunyikan (Amurwani, 2006). Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan, *disclosure* mengandung arti bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha (Chariri dan Ghozali, 2003). Dengan demikian, informasi tersebut harus lengkap, jelas dan dapat menggambarkan secara tepat kejadian-kejadian ekonomi yang berpengaruh terhadap hasil operasi unit usaha tersebut. Na'im dan Rakhman (2000) menyatakan bahwa pengungkapan secara sederhana dapat diartikan sebagai pengeluaran informasi, sedangkan Hendriksen (2001) mengartikan pengungkapan sebagai penyajian sejumlah informasi yang dibutuhkan untuk pengoperasian secara optimal pasar modal yang efisien.

Menurut Soewardjono (2005:560) pengungkapan dapat diwajibkan untuk beberapa tujuan. Pertama, tujuan melindungi yang dilandasi oleh gagasan bahwa tidak semua pemakai cukup canggih

sehingga pemakai yang naif perlu dilindungi dengan mengungkapkan informasi yang mereka tidak mungkin memperolehnya atau tidak mungkin mengolah informasi untuk menangkap substansi ekonomik yang melandasi suatu pos statement keuangan. Kedua, tujuan informasi yang dilandasi oleh gagasan bahwa pemakai yang dituju sudah jelas dengan tingkat kecanggihan tertentu. Ketiga, tujuan kebutuhan khusus yang merupakan gabungan dari tujuan perlindungan publik dan tujuan informatif.

Menurut Suhardjanto (2012) terdapat dua sifat pengungkapan, yaitu pengungkapan yang didasarkan pada ketentuan (*required/regulated/mandatory disclosure*) dan pengungkapan yang bersifat sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku (Bapepam, 2002). Menurut Suwardjono (2005), pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) adalah pengungkapan yang bersifat wajib meliputi pengungkapan yang didasarkan atas ketentuan/standar yang berlaku. Pengungkapan wajib bertujuan memenuhi kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan, dengan cara memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kesehatan keuangan perusahaan dan menghitung beban masa depan sehingga investor dapat menentukan kesempatan pertumbuhan jangka panjang dan memperkirakan aliran kas keluar untuk suatu bisnis (Al Akra et al., 2010).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal telah mengatur berbagai bentuk pelanggaran dan tindakan pidana pasar modal beserta sanksi bagi pelakunya. Perbuatan yang dilarang tersebut meliputi pemalsuan dan penipuan, manipulasi pasar dan insider trading. Bila terjadi pelanggaran perundang-undangan pasar modal atau ketentuan di bidang pasar modal lainnya maka Bapepam sebagai penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran tersebut. Penetapan sanksi akan diberikan atau diputuskan oleh ketua Bapepam setelah mendapat masukan dari bagian pemeriksaan dan penyidikan. Sanksi dapat berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengungkapan wajib merupakan penyajian informasi dalam laporan keuangan yang bertujuan memberikan informasi sesuai dengan standar atau peraturan yang berlaku kepada semua pihak yang membutuhkan informasi mengenai kesehatan keuangan perusahaan.

4. Faktor yang Mempengaruhi *Mandatory Disclosure*

Dari berbagai penelitian sebelumnya, diperoleh kajian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *mandatory disclosure*. Beberapa mekanisme tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) dan kepemilikan yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* antara lain:

a. Jumlah Anggota Dewan Komisaris

Menurut Rahmawati dan Sutyok (2014), Jumlah Anggota Dewan Komisaris dapat mempengaruhi pengungkapan, karena dewan komisaris dapat mengawasi pelaksanaan kebijakan, termasuk kebijakan dalam tingkat pengungkapan wajib.

b. Jumlah Anggota Komite Audit

Menurut Pitasari *et al.*, (2014), Jumlah Anggota Komite Audit berpengaruh pada tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Komite audit mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan telah mengungkapkan informasi sesuai dengan persyaratan yang diwajibkan.

c. Proporsi Komisaris Independen

Komisaris independen adalah komisaris yang berasal dari luar perusahaan (Suhardjanto dan Afni, 2009). Dengan makin besarnya proporsi komisaris independen maka proses pengawasan yang dilakukan dewan ini makin berkualitas dengan makin banyaknya pihak independen dalam perusahaan yang menuntut adanya transparansi dalam pelaporan keuangan perusahaan (Nasution dan Setiawan, 2007).

d. Kepemilikan Manajerial

Menurut Utami *et al.*, (2012) Kepemilikan Manajerial dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib karena manajer yang

memiliki saham perusahaan dapat memaksimalkan kinerjanya termasuk dalam kepatuhan terhadap pengungkapan wajib.

e. Kepemilikan Institusional

Menurut Utami *et al.*, (2012) Kepemilikan Institusional juga dapat berpengaruh dalam pengungkapan wajib. Adanya kepemilikan institusional yang besar diharapkan dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib yang semakin banyak. Kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional dapat mengurangi masalah keagenan.

f. Kepemilikan Asing

Perusahaan dengan kepemilikan saham asing yang besar akan terdorong untuk mengungkapkan informasinya secara sukarela dan lebih luas (Huafang dan Jianguo, 2007 dalam Rustiarini, 2011), hal ini dikarenakan seringnya terjadi asimetri informasi yang disebabkan oleh hambatan geografi dan bahasa.

g. Ukuran perusahaan

Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan. Ukuran perusahaan dapat diukur diproksikan dalam bentuk aset, penjualan, total tenaga kerja, nilai kapitalisasi pasar dan sebagainya (Suhardjanto, 2010). Menurut Cowen *et. al.* (1987), perusahaan besar berada dalam tekanan untuk mengungkapkan aktivitas mereka untuk melegitimasi bisnis mereka karena perusahaan besar melakukan aktivitas yang lebih banyak, memiliki pengaruh yang

lebih besar kepada masyarakat, memiliki pemegang saham yang mungkin peduli dengan program lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan, dan laporan tahunannya lebih efisien dalam mengkomunikasikan informasi tersebut kepada *stakeholder*.

5. *Corporate Governance*

a. *Pengertian Corporate governance*

Corporate governance atau Tata Kelola Perusahaan adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan (FCGI 2001 dalam Prawinandi et al., 2012). Sedangkan Denis dan McConnell (2003) mendefinisikan *corporate governance* sebagai seperangkat mekanisme baik institusional maupun *market based* yang mendorong pengendali kepentingan perusahaan untuk membuat keputusan yang memaksimalkan nilai perusahaan kepada pemilik (pemasok modal).

Herwidayatmo (2000) mengatakan bahwa elemen dari *corporate governance* meliputi struktur dan proses yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan kegiatan perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas. *Corporate Governance* juga didefinisikan sebagai suatu sistem yang

digunakan khususnya untuk pengendalian internal pada perusahaan, dimana perusahaan tersebut telah menetapkan tujuan dalam pengelolaan resiko untuk pemenuhan tujuan bisnis melalui pengamanan asset dan sebagai peningkatan nilai investasi jangka panjang bagi pemegang saham (Istiqomah dan Pujiati, 2015). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *Corporate Governance* merupakan sistem yang baik digunakan untuk mengelola dan pengendalian perusahaan yang bertujuan sebagai alat untuk meningkatkan nilai pemegang saham dan membantu pihak-pihak yang berkepentingan.

Penerapan *corporate governance* yang baik harus didasarkan pada beberapa prinsip. Menurut FCGI (2001), *Corporate Governance* mempunyai lima prinsip yang baik. Kelima prinsip tersebut adalah:

- a. Transparansi adalah suatu keterbukaan atas informasi yang harus diungkapkan sejalan dengan pembukuan dan bersifat relevan, adil, tepat waktu serta efisien dan terbuka dalam pengambilan keputusan. Prinsip transparansi merupakan prinsip penting dalam *corporate governance* kaitannya dalam pengambilan keputusan ekonomi karena saat pengambilan keputusan ekonomi semua pihak harus mengetahui latar belakang, alasan dan kegunaan dari keputusan yang akan diambil.

- b. Akuntabilitas, adalah suatu tindakan yang harus dilakukan oleh anggota dewan direksi demi kepentingan perusahaan yang penilaian bersifat independen dan mempunyai akses yang akurat, relevan dan tepat waktu. Prinsip akuntabilitas menuntut jawaban dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas yang telah dibebankan pada satu fungsi karena dalam kata *accountability* mengandung makna *answerability*, *liability*, dan *responsibility*.
- c. Pertanggungjawaban, adalah memberikan suatu jaminan atas hak-hak pihak yang berkepentingan untuk memastikan kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan, hal ini sangat penting bagi kegiatan operasional perusahaan dalam kaitannya dengan pemenuhan undang-undang yang telah diatur.
- d. Independensi, adalah situasi pengelolaan perusahaan dilakukan secara professional tanpa adanya pengaruh atau tekanan dari pihak lain yang tidak sesuai undang-undang dan prinsip korporasi yang sehat. Prinsip kemandirian dan prinsip pertanggungjawaban saling berkaitan. Dengan dijalankannya prinsip kemandirian maka perusahaan akan dapat menerapkan prinsip pertanggungjawaban untuk menghindari kemungkinan terjadinya benturan kepentingan antara berbagai pihak.
- e. Kewajaran, adalah perlindungan untuk seluruh pemegang saham. Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak

stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini perusahaan harus memberikan jaminan dan perlakuan yang sama terhadap *stakeholders* untuk menghindari terjadinya konflik dengan menginformasikan semua hak dan kewajiban serta kewenangan dari masing-masing *stakeholders*.

Menurut Sutedi (2012) terdapat unsur-unsur *corporate governance* yang berasal dari dalam perusahaan (dan yang selalu diperlukan di dalam perusahaan) serta unsur-unsur yang ada di luar perusahaan (dan yang selalu diperlukan diluar perusahaan) yang bisa menjamin terlaksananya *good corporate governance*. Mekanisme internal terdiri dari dewan komisaris, komite audit serta stuktur kepemilikan, sedangkan mekanisme eksternal lebih condong kepada pengendalian perusahaan serta system yang berlaku.

Oleh karena itu, *Corporate Governancae* diperlukan untuk mengawasi kinerja perusahaan dan menjamin bahwa perusahaan mengungkapkan semua informasi yang bersifat material.

b. Macam-macam *Corporate Governance*

1. Jumlah Anggota Dewan Komisaris

Inti dari *Corporate Governance* Indonesia ada pada dewan komisaris karena tugas utama dewan komisaris adalah mengawasi dan mengevaluasi pembuatan kebijakan dan

pelaksanaan kebijakan tersebut oleh dewan direksi serta memberi nasihat kepada dewan direksi (Muntoro, 2005). Menurut Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, jumlah minimal anggota dewan komisaris adalah satu orang. Semakin besar dewan komisaris di dalam perusahaan maka pengawasan, pengevaluasian, dan pelaksanaan kebijakan oleh direksi semakin berkualitas sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai perusahaan sehingga akan mempengaruhi tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.

Dalam pedoman umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada tahun 2006, disebutkan bahwa kepengurusan perseroan terbatas di Indonesia menganut system dua badan (*two-board system*) yaitu Dewan Komisaris dan Direksi yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan (*fiduciary responsibility*).

2. Jumlah Anggota Komite Audit

Suatu perusahaan agar mampu untuk menjalankan fungsi ditengah lingkup bisnis secara keseluruhan, perlu adanya suatu pembentukan komite-komite yang dibentuk oleh dewan komisaris, sehingga diharapkan mampu untuk membantu

Dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya, diantaranya yaitu komite audit (FCGI, 2001). Tugas dari komite audit sendiri yaitu membantu dan memberikan pendapat kepada dewan komisaris bahwa laporan keuangan sudah disajikan secara wajar dan sesuai prinsip akuntansi berlaku umum (Istiqomah dan Pujiati, 2015). Komite audit dipandang sebagai komite dalam perusahaan yang bertugas untuk mengawasi kinerja manajemen untuk menghindari terjadinya kecurangan dalam pelaporan keuangan yang dapat merugikan *stakeholders*.

Menurut Hukum Efek 2002 (dikutip oleh Al Akra et al., 2010), anggota komite audit bertanggung jawab untuk memantau kepatuhan perusahaan dengan persyaratan pengungkapan wajib. Komite audit bertugas memberikan pendapat profesional yang independen kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris (Trisnawati, 2009). Dalam pedoman umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang dikeluarkan oleh KNKG tahun 2006, disebutkan bahwa komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan:

- a) Laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

- b) Struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik.
- c) Pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku.
- d) Tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.

6. Struktur Kepemilikan

a. Pengertian Struktur Kepemilikan

Menurut Jensen, M.C dan Meckling, W.H. (1976: 358), menjelaskan bahwa istilah struktur kepemilikan menunjukkan fakta bahwa variabel-variabel yang penting Dalam struktur modal tidak hanya ditentukan oleh jumlah relative utang dan ekuitas tetapi juga persentase ekuitas yang dipegang oleh manajer.

Struktur kepemilikan merupakan satu mekanisme *Corporate governance* untuk mengurangi konflik antara manajemen dan pemegang saham. Kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional adalah bagian dari struktur kepemilikan yang termasuk dalam mekanisme *corporate governance* yang dapat mengurangi masalah keagenan.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa struktur kepemilikan merupakan suatu mekanisme dari *corporate*

governance yang dapat mengurangi konflik keagenan antara manajemen dengan pemegang saham.

b. Macam-macam Struktur Kepemilikan

1) Kepemilikan Manajerial

Menurut Wayan (2008) kepemilikan manajerial adalah kondisi yang menunjukkan bahwa manajemen memiliki saham dalam perusahaan dan sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. Pihak manajemen tersebut adalah mereka yang duduk di dewan komisaris dan dewan direksi perusahaan.

Menurut Wahidahwati (2002: 607), kepemilikan manajerial didefinisikan sebagai tingkat kepemilikan saham pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan, misalnya seperti direktur, manajemen, dan komisaris.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial merupakan kondisi dimana pihak manajemen perusahaan memiliki rangkap jawaban yaitu sebagai manajemen perusahaan dan juga sebagai pemegang saham serta berperan aktif dalam pengambilan keputusan yang ada di perusahaan.

Kepemilikan manajerial ditunjukkan dengan besarnya presentase kepemilikan saham oleh pihak manajemen perusahaan. Manajer yang memiliki saham perusahaan tentunya

akan menselaraskan kepentingannya sebagai manajer dengan kepentingannya sebagai pemegang saham.

2) Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham pada akhir tahun yang dimiliki oleh lembaga, seperti asuransi, bank atau institusi lain (Beiner et al, 2003). Definisi tersebut tidak berbeda dengan definisi menurut Guna (2010) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh instansi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank dana pension dan investment banking.

Sedangkan Gabriella (2011) menyatakan bahwa Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pihak-pihak yang berbentuk institusi seperti yayasan, bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dana pensiun, perusahaan berbentuk perseroan (PT), dan institusi lainnya. Institusi biasanya dapat menguasai mayoritas saham karena mereka sumber daya yang lebih besar dibandingkan dengan pemegang saham lainnya. Oleh karena menguasai saham mayoritas, maka pihak institusional dapat melakukan pengawasan terhadap kebijakan manajemen secara lebih kuat dibandingkan dengan pemegang saham lainnya.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh instansi keuangan yang dapat membantu memonitor kinerja yang dilakukan oleh manajemen. Kepemilikan institusional yang besar akan menghasilkan upaya pengendalian yang lebih intensif.

B. Penelitian yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Intan Alvionita dan Salma Taqwa (2015)

Penelitian yang dilakukan oleh Intan Alvionita dan Salma Taqwa berjudul Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure*. Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel proporsi komisaris independen dan jumlah anggota komite audit tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*, sedangkan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan *mandatory disclosure*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada populasi penelitian. Populasi penelitian dalam penelitian yang dilakukan oleh Intan Alvionita dan Salma Taqwa adalah laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013, sedangkan populasi penelitian yang akan dilakukan menggunakan laporan keuangan perusahaan perbankan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Anggita Pitasari (2014)

Penelitian yang dilakukan oleh Anggita Pitasari yang berjudul *Analisi Pengaruh Struktur Corporate Governance Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Konvergensi IFRS pada Laporan Laba Rugi Komprehensif*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana struktur *corporate governance* perusahaan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS dalam laporan laba rugi komprehensif adalah 50,61%. Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa struktur *corporate governance* yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif yaitu jumlah anggota komite audit dan jumlah rapat komite audit. Sementara itu, variabel jumlah anggota dewan komisaris, proporsi komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris, leverage, likuiditas, dan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ula Restu Rafifah (2015)

Penelitian yang dilakukan oleh Ula Restu Rafifah yang berjudul *Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Sukarela Laporan Tahunan*. Menunjukkan bahwa jumlah rapat dewan komisaris yang berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sukarela

dengan arah positif, sedangkan dewan komisaris dan kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan sukarela. Perbedaan penelitian Ula dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada populasi penelitian. Pada penelitian ini populasi yang diambil adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010, 2011, 2012, dan 2013. Persamaan penelitian yang dilakukan Ula dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menggunakan dewan komisari dan kepemilikan institusional sebagai variabel yang mempengaruhi pengungkapan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmadhani (2016)

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmadhani yang berjudul *Pengaruh Struktur Corporate Governance Terhadap Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure Di Indonesia*. Menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Jumlah anggota dewan komisaris dan jumlah anggota komite audit juga tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Rahmadhani dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada populasi penelitian. Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia periode 2013-2015. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Rahmadhani dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada variabel yang

digunakan, yakni menggunakan variabel dewan komisaris, komite audit, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Sutyok dan Evi Rahmawati (2014)

Penelitian yang dilakukan oleh Sutyok dan Evi Rahmawati yang berjudul *Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure Konvergensi IFRS di Perbankan*. Menunjukkan bahwa jumlah dewan komisaris dan jumlah rapat dewan komisaris memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib atas konvergensi IFRS. Namun jumlah komite audit berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pengungkapan konvergensi IFRS. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Sutyok dan Evi dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada mekanisme *corporate governance*. Jika dalam penelitian ini menggunakan jumlah dewan komisaris, rapat dewan komisaris dan komite audit, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan hanya menggunakan jumlah anggota dewan komisaris dan jumlah komite audit, namun ada penambahan pada variabel struktur kepemilikan. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Sutyok dan Evi dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menggunakan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai populasi penelitian, hanya berbeda pada periode saja.

C. Kerangka Berpikir

1. Pengaruh Jumlah Anggota Dewan Komisaris terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI

Corporate Governance di Indonesia umumnya berpusat pada dewan komisaris karena tugas utama dari dewan komisaris itu sendiri adalah mengawasi dan mengevaluasi pembuatan kebijakan serta memberi nasihat kepada dewan direksi atas pelaksanaan kebijakan tersebut. Semakin besar dewan komisaris didalam suatu perusahaan maka pengawasan, pengevaluasian, serta pelaksanaan kebijakan oleh direksi akan semakin berkualitas sehingga pelaksanaan tersebut dapat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan.

Menurut Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, bahwa jumlah anggota dewan komisaris minimal adalah satu orang. Banyaknya jumlah dewan komisaris dalam perusahaan dinilai dapat meningkatkan kepatuhan *Mandatory Disclosure*, hal ini disebabkan karena jumlah dewan komisaris dapat membantu pengawasan dalam menyajikan laporan keuangan kepada publik. Besarnya jumlah anggota dewan komisaris juga memungkinkan perusahaan tidak didominasi oleh pihak manajemen dalam menjalankan perannya.

2. Pengaruh Jumlah Anggota Komite Audit terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI

Komite audit merupakan pihak independen yang bertanggung jawab langsung kepada dewan komisaris. Komite audit berperan untuk mengawasi audit internal maupun sistem pengendalian audit internal tersebut serta membantu dan memberikan pendapat kepada dewan komisaris bahwa laporan keuangan sudah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Komite audit bertugas secara terpisah dengan dewan komisaris dalam kaitannya dengan pemenuhan tanggung jawab dalam memberikan pengawasan secara keseluruhan serta memberikan pendapat profesional dan independen kepada dewan komisaris mengenai laporan atau hal-hal lain yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris. Dengan adanya komite audit, diharapkan mampu menciptakan laporan keuangan yang bebas dari manipulasi pihak manapun dan relevan sehingga dapat digunakan sebagai evaluasi bagi manajemen.

Jumlah anggota komite audit dalam perusahaan dapat meningkatkan kepatuhan *mandatory disclosure* karena komite audit dapat berperan sebagai pengawas, pemeriksa serta dapat mendorong manajemen perusahaan untuk mengungkapkan laporan keuangan. Komite audit juga diharapkan dapat menciptakan lingkungan usaha yang transparan dan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

perusahaan sehingga diharapkan komite audit dapat meningkatkan kepatuhan *mandatory disclosure*.

3. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI

Kepemilikan manajerial merupakan kondisi dimana manajer memiliki rangkap jabatan, selain sebagai pengelola perusahaan manajer juga sebagai pemilik saham di perusahaan tersebut. Kepemilikan manajerial dianggap sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan perusahaan dalam melakukan transparansi dalam menyajikan laporan keuangan. Dengan adanya kepemilikan manajerial maka kemungkinan adanya tindak manipulasi laporan keuangan akan semakin kecil, karena manajer terlibat secara langsung dalam pengelolaan perusahaan. Semakin besar kepemilikan manajerial maka manajemen akan semakin berusaha untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka memenuhi kepentingan pemegang saham, yang termasuk di dalamnya manajemen itu sendiri. Oleh karena itu, pihak manajemen akan berusaha memaksimalkan nilai perusahaan agar dapat meyakinkan pihak eksternal untuk melakukan investasi, salah satunya dengan memaksimalkan kinerjanya sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* dalam laporan keuangan.

4. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain. Investor institusional memiliki peran yang besar dalam pengawasan karena terlibat dalam pengambilan keputusan yang strategis bagi perusahaan sehingga manajer akan lebih efektif dalam pengambilan keputusan. Semakin besar kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan maka akan semakin besar pengawasan terhadap kinerja manajemen sehingga kinerja perusahaan akan meningkat serta akan mengurangi perilaku *opportunistic* para manajer.

Dengan adanya pengawasan dari institusi, manajer juga akan lebih berhati-hati dalam pengelolaan perusahaan dan memiliki kemungkinan yang sangat kecil untuk melakukan tindakan manipulasi, hal itu juga akan mendorong pengungkapan informasi yang lebih luas dalam laporan keuangan. Kepemilikan institusional dirasa mampu membuat perusahaan untuk meningkatkan kepatuhan *mandatory disclosure* di dalam laporan keuangan.

5. Pengaruh Jumlah Anggota Dewan Komisaris, Jumlah Anggota Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Institusional secara simultan terhadap Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI

Dewan komisaris merupakan salah satu elemen dalam *corporate governance* yang sangat penting dalam perusahaan. Dewan komisaris memiliki wewenang dalam mengawasi secara keseluruhan mengenai kegiatan yang dilakukan dalam perusahaan. Pemberhentian maupun pengangkatan dewan komisaris dilaksanakan melalui rapat umum pemegang saham. Semakin besar jumlah anggota dewan komisaris pada perusahaan maka semakin besar tingkat kepatuhan pengungkapan dalam laporan keuangan perusahaan, karena komisaris yang kompeten akan mempunyai integritas dan mempunyai pengalaman yang banyak serta ketelitian dalam melakukan tugasnya.

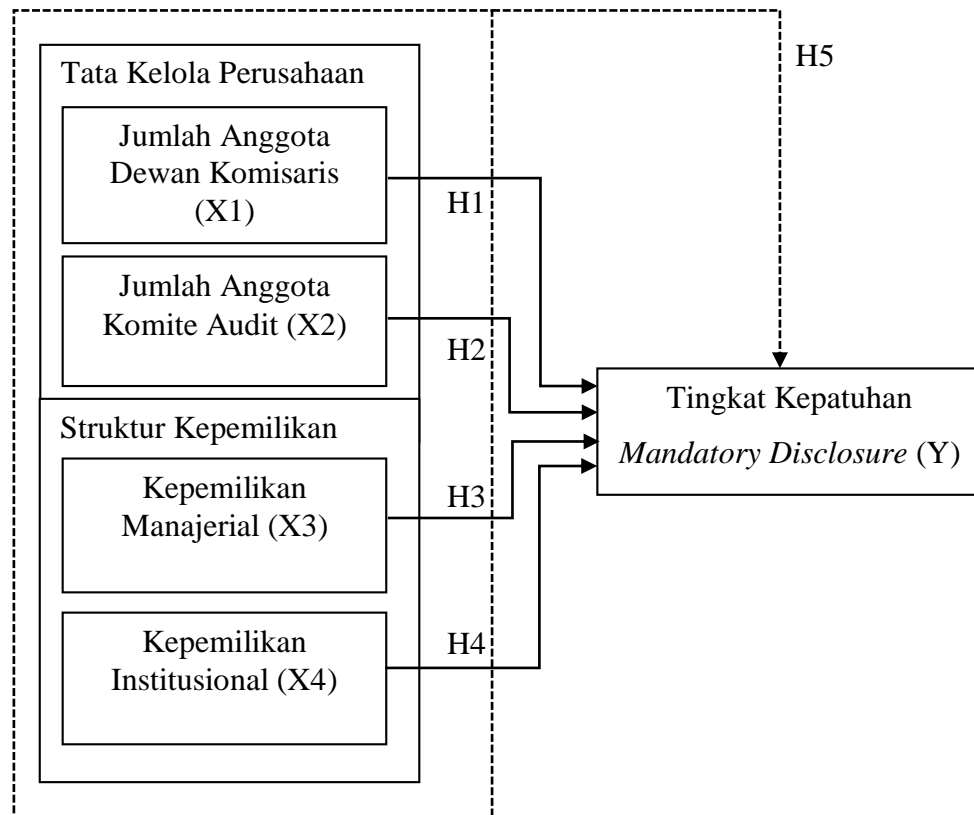
Pada pelaksanaan *corporate governance*, teori agensi mewajibkan untuk melaksanakan pengungkapan laporan keuangan untuk mencegah terjadinya perselisihan antara pihak yang memiliki kepentingan. Pada kenyataannya bahwa komite audit dituntut untuk bekerja dalam mengawasi kinerja manajemen dalam melakukan pengungkapan yang lebih akurat, lengkap dan jelas. Semakin banyak jumlah komite audit dalam suatu perusahaan maka akan mempengaruhi tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh pihak internal perusahaan. Dengan adanya keterlibatan manajer dalam kepemilikan saham, dapat membantu untuk mendorong manajer berhati-hati dalam bertindak, karena manajer akan ikut andil dalam konsekuensi keputusan yang diambil sebagai bagian dari pemegang saham perusahaan. Semakin banyak kepemilikan manajerial pada suatu perusahaan akan memaksimalkan tingkat pengungkapan.

Selain kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional juga dapat membantu dalam memonitor kinerja yang dilakukan oleh manajemen. Kepemilikan institusional yang relatif besar akan menghasilkan upaya pengawasan yang lebih intensif. Kepemilikan institusional yang besar dalam perusahaan akan memberikan pengaruh yang besar dalam pengawasan kinerja manajemen.

Dari penjelasan diatas peneliti menduga bahwa jumlah anggota dewan komisaris, jumlah anggota komite audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional secara simultan dapat memberikan pengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.

D. Paradigma Penelitian



Keterangan :

—————→ : Pengaruh variabel independen Jumlah Anggota Dewan Komisaris, Jumlah Anggota Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Institusional terhadap variabel dependen Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure*.

-----→ : Pengaruh variabel independen Jumlah Anggota Dewan Komisaris, Jumlah Anggota Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Institusional terhadap variabel dependen Tingkat

Kepatuhan *Mandatory Disclosure* secara simultan
(bersama-sama).

E. Hipotesis Penelitian

1. H1 = Jumlah Anggota Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure*
2. H2 = Jumlah Anggota Komite Audit berpengaruh positif terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure*
3. H3 = Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure*
4. H4 = Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure*
5. H5 = Jumlah Anggota Dewan Komisaris, Jumlah Anggota Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Institusional secara simultan berpengaruh positif terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kausal komparatif. Penelitian kausal komparatif adalah penelitian yang memiliki tujuan untuk menyelidiki adanya kemungkinan hubungan sebab akibat berdasarkan pengamatan terhadap fenomena yang diteliti.

Jenis data yang terdapat pada penelitian ini berbentuk angka sehingga termasuk dalam pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang lebih menekankan pada pengumpulan data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data berbentuk angka atau data yang diangkakan. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010 dan 2015 karena merupakan data yang baru.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui situs web www.idx.co.id. Sumber data penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh secara historis dari laporan tahunan dan laporan keuangan yang disajikan di perusahaan perbankan yang telah *go public* dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2015. Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan selama 2 bulan yaitu dari bulan Februari 2017 sampai bulan Maret 2017.

C. Definisi Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2007: 2), variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen dan variabel independen.

1. Variabel Dependen (Terikat)

Menurut Sugiyono (2007: 4), variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure*. *Mandatory Disclosure* merupakan pengungkapan yang telah diatur secara ketat oleh aturan yang telah ditetapkan oleh pembuat aturans atau standar akuntansi yang harus dipatuhi oleh setiap perusahaan yang disyaratkan. *Mandatory disclosure* diukur dengan menggunakan teknik *scoring*, yakni jika item *mandatory disclosure* diungkapkan perusahaan diberi angka 1 dan bila tidak diberi angka 0, serta N/A jika item tersebut tidak dapat diterapkan di dalam perusahaan (Apostolou dan Napoulos, 2009). Tingkat kepatuhan *Mandatory Disclosure* dalam penelitian ini menggunakan metode *partial compliance weighted* yakni menjumlahkan item yang dapat diungkapkan oleh perusahaan kemudian membagi hasilnya dengan total item yang mungkin dapat diterapkan oleh perusahaan (Tsalvoutas *et al.*,

2008). Persamaan untuk menghitung tingkat kepatuhan *Mandatory Disclosure* ini adalah sebagai berikut:

$$\text{MDSCORE}_{iBY} = \frac{\sum \text{SCORE}_{iBY}}{\sum \text{MAX}_{iBY}} \times 100 \%$$

MDSCORE i_{BY} menunjukkan skor pengungkapan perusahaan B pada tahun Y, MAX i_{BY} menunjukkan nilai maksimum yang mungkin dicapai perusahaan B pada tahun Y, i menunjukkan Item dalam *framework*, SCORE i_{BY} menunjukkan skor item i, perusahaan B tahun Y.

2. Variabel Independen (Bebas)

a. Jumlah Anggota Dewan Komisaris

Jumlah anggota dewan komisaris adalah banyaknya anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan (Ujiyantho dan Pramuka, 2007). Jumlah dewan komisaris diukur dengan jumlah komisaris dari pihak terafiliasi (memiliki hubungan, salah satunya pihak internal perusahaan) dan tidak terafiliasi (tidak memiliki hubungan dengan perusahaan (KNKG 2006 dalam Prawinandi *et al.*, 2012).

b. Jumlah Anggota Komite Audit

Komite audit merupakan komite yang memiliki tugas yaitu membantu dewan komisaris menentukan bahwa laporan keuangan telah tersedia secara wajar sesuai prinsip akuntansi berlaku umum, audit internal dan eksternal telah terlaksana sesuai standar audit, dan untuk hasil temuan audit selanjutnya akan ditangani oleh manajemen (BAPEPAM-LK, 2010). Jumlah anggota komite audit

yang diatur dalam surat edaran ketua BAPEPAM no. SE – 03/PM/2000 tanggal 5 Mei 2000 adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang. Pengukuran penelitian menggunakan jumlah anggota komite audit dalam perusahaan (Prawinandi et al., 2012).

c. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan kondisi dimana manajemen perusahaan memiliki rangkap jabatan yaitu sebagai manajemen perusahaan dan pemegang saham serta berperan aktif dalam pengambilan keputusan yang ada di perusahaan. Semakin banyak saham yang dimiliki manajerial maka manajemen akan sangat memperhatikan kinerja keuangan yang akan diungkapkan dalam laporan keuangan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur kepemilikan manajerial adalah persentase jumlah saham yang dimiliki pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang beredar (Suryani 2010 dalam Utami *et al.*, 2012).

$$KM = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki manajemen}}{\text{Total saham beredar}} \times 100 \%$$

d. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga akan mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib (Boediono, 2005). Konsentrasi kepemilikan institusional merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh

institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain) (Tarjo, 2008)

Sesuai dengan Utami, Suhardjanto & Hartoko (2012), kepemilikan institusional dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator persentase jumlah saham yang dimiliki institusi dari seluruh saham yang beredar.

$$KI = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki Institusional}}{\text{Total saham beredar}} \times 100 \%$$

D. Populasi

Populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2007: 80). Menurut Supranto (2008: 22) populasi adalah sekumpulan dari seluruh elemen sejenis tetapi dapat dibedakan satu sama lain karena karakteristiknya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2015. Dalam penelitian ini terdapat 43 perusahaan yang dijadikan sebagai populasi penelitian. Pemilihan sampel perusahaan perbankan karena dalam perusahaan perbankan terdapat regulasi dan kriteria tertentu dari Bank Sentral yang harus dipenuhi.

E. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2007: 81). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *sampling purposive* yaitu teknik penentuan

sampel dengan pertimbangan atau karakteristik-karakteristik tertentu. Menurut Cholid dan Abu (2005: 116), *sampling purposive* adalah teknik berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi. Berikut ini kriteria yang digunakan untuk menentukan sampel pada penelitian ini adalah :

1. Bank yang terdaftar sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia.
2. Bank yang mempublikasikan laporan keuangan dan laporan tahunan untuk periode 31 Desember 2010 sampai 31 Desember 2015.
3. Bank yang mengungkapkan data mengenai Jumlah anggota dewan komisaris, jumlah anggota komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional.

Setelah dilakukan teknik *purposive sampling* pada populasi, terdapat 12 sampel yang dapat dijadikan sebagai sampel penelitian. Penelitian ini terdiri dari 6 periode (tahun) pengamatan, sehingga sampel yang didapatkan berjumlah 72 set data (12 x 6 periode).

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yaitu data mengenai variabel yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, website, jurnal-jurnal, artikel, tulisan ilmiah dan catatan di media masa. Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang dapat diperoleh dari laporan keuangan dan laporan tahunan

yang telah diaudit periode 2010 dan 2015 pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data-data tersebut diperoleh melalui situs resmi yang dimiliki oleh BEI yaitu www.idx.co.id.

G. Teknik Analisis Data

1. Analisis Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan tentang gambaran objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku secara umum (Sugiyono, 2011: 29). Data yang dilihat dari analisis statistika deskriptif meliputi rata-rata (mean), nilai minimum, nilai maksimum, range, variance dan standar deviasi.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas menguji tentang distribusi normal yang terdapat pada model regresi dan variabel residual (Ghozali, 2011). Untuk melihat model regresi normal atau tidak, dilakukan analisis grafik dengan melihat “*normal probability report plot*” yang membandingkan antara distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi normal. Hasil pengujian data dilakukan dengan menguji *Kolmogorov-Smirnov* yang memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Jika hasil pengujian menunjukkan signifikansi $> 0,05$ berarti data pada variabel berdistribusi normal.
2. Jika hasil pengujian menunjukkan signifikansi $< 0,05$ berarti data pada variabel tidak berdistribusi secara normal

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas merupakan syarat yang digunakan dalam analisis regresi berganda yang digunakan untuk mengkaji ada korelasi atau tidak ada korelasi antar variabel independen. Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen (Husain Umar, 2011: 177).

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya serta dari VIF (*Variance Inflation Factor*). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Formula yang digunakan dalam uji multikolinearitas sebagai berikut:

$$VIF_i = \frac{1}{1 - r^2_i}$$

Keterangan:

VIF : *Variance Inflation Factor*

r : koefisien korelasi

Hipotesa yang digunakan dalam uji multikolinearitas adalah:

Ho : Tidak ada Multikolinearitas

Ha : Ada Multikolinearitas

Kriteria dari pengujian ini yaitu :

1. Jika $VIF > 10$ atau jika $tolerance < 0,1$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima
2. Jika $VIF < 10$ atau jika $tolerance > 0,1$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi memiliki tujuan yaitu untuk menguji apakah terdapat korelasi antara linier pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya) dalam model regresi linier (Ghozali, 2011). Penelitian ini menggunakan uji *Durbin Watson* pada model analisis regresi yang menguji ada dan tidaknya autokorelasi. Formula yang digunakan untuk uji autokorelasi sbagai berikut:

$$DW = \frac{\sum(e - e_{t-1})^2}{\sum e_t^2}$$

Keterangan:

DW : Nilai *Durbin Watson*

E : Nilai Residual

e_{t-1} : Nilai Rsidual satu periode

Kriteria dari uji autokorelasi yaitu :

1. Jika $d < dL$ atau $> (4-dL)$, maka hipotesis 0 ditolak, artinya terdapat autokorelasi.
2. Jika d terletak antara dU dan $(4-du)$, maka hipotesis 0 diterima, artinya tidak ada autokorelasi.
3. Jika d terletak antara dL dan dU atau diantara $(4-dU)$ dan $(4-dL)$, maka tidak ada kesimpulan pasti.

d. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas menguji terjadinya perbedaan variance-variance dari residual pengamatan satu ke pengamatan lain itu tetap pada model regresi. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda maka disebut heteroskedastisitas (Ghozali,2011). Uji heteroskedastisitas menggunakan *uji glejser* yang dilihat dari tingkat kepercayaan yaitu 5% atau 0,05. *Uji Glejser* yaitu mengkorelasikan nilai absolut residual dengan variabel independen. Model regresi yang baik, apabila regresi tersebut tidak mengandung gejala heteroskedastisitas.

Kriteria dalam uji heteroskedastisitas sebagai berikut:

1. Jika hasil pengujian menunjukkan signifikansi $> 0,05$, berarti tidak terdapat heteroskedastisitas.
2. Jika hasil pengujian menunjukkan signifikansi $< 0,05$, berarti terdapat heteroskedastisitas.

3. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda. Adapun Model persamaan regresi untuk menguji hipotesis adalah:

$$\text{MANDSCR} = \alpha + \beta_1 \text{JADK} + \beta_2 \text{JAKA} + \beta_3 \text{KM} + \beta_4 \text{KI} + e$$

Keterangan :

MANDSCR = *Mandatory Disclosure*

JADK = Jumlah Anggota Dewan Komisaris

JAKA = Jumlah Anggota Komite Audit

KM = Kepemilikan Manajerial

KI = Kepemilikan Institusional

e = Error

a. Uji Nilai t

Uji nilai t (uji individual) digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). Rumus dari Uji Nilai t sebagai berikut :

$$t = \frac{r \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan :

t : t hitung

r : Koefisien korelasi

n : Jumlah sampel

(Sugiyono, 2010:250)

Kriteria dari pengujian ini yaitu:

- a) Jika nilai t hitung positif dan $\text{sig } t < \alpha$ (0,05) maka hipotesis diterima. Artinya bahwa variabel independen berpengaruh positif terhadap variabel dependen.
- b) Jika nilai t hitung positif dan $\text{sig } t > \alpha$ (0,05) maka hipotesis ditolak. Artinya variabel independen berpengaruh negatif terhadap variabel dependen.

b. Uji Nilai F

Uji Nilai F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen (Jumlah Anggota Dewan Komisaris, Jumlah Anggota Komite Audit, Struktur Kepemilikan, dan Struktur Institusional) dapat mempengaruhi variabel dependen (Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* IFRS). Rumus Uji Nilai F adalah sebagai berikut :

$$F_{reg} = \frac{R^2 (N-m-1)}{m(1-R^2)}$$

Keterangan :

F_{reg} : Harga F garis regresi

N : Banyak sampel

M : banyak prediktor

R^2 : koefisien korelasi antara kriterium dengan prediktor

Kriteria untuk menerima atau menolak hipotesis adalah sebagai berikut :

- a) Jika nilai $\text{sig } F < \alpha (0,05)$ artinya bahwa variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variable dependen.
- b) Jika nilai $\text{sig } F > \alpha (0,05)$ artinya bahwa variabel independen secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

c. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Besarnya koefisien determinasi ditunjukkan dengan nilai *Adjusted R Square*. Nilai koefisien determinasi antara 0 – 1. Semakin mendekati angka 1, maka semakin tinggi kemampuan variabel independen menjelaskan variasi variabel dependen (Ghazali, 2011).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan audit yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id. Populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2010-2015 dengan jumlah 72 perusahaan. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria tertentu. Berdasarkan dengan kriteria yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya maka diperoleh jumlah sampel sebanyak 12 perusahaan. Berikut ini data pemilihan populasi dan sampel:

Tabel 1. Pemilihan Populasi dan Sampel

No	Keterangan	Jumlah Perusahaan
1	Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI selama periode pengamatan 2010-2015.	43
2	Perusahaan yang tidak terdaftar atau IPO sebelum periode pengamatan yaitu 2010-2015.	13
3	Perusahaan yang tidak mengungkapkan data mengenai Jumlah anggota dewan komisaris, jumlah anggota komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional	31
4	Jumlah sampel dalam 1 periode	12
5	Jumlah sampel dalam 6 periode (12X6)	72

B. Hasil Penelitian

1. Analisis Statistik Deskriptif

Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dan memiliki tujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan tentang gambaran yang diteliti melalui data sampel tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum (Sugiyono, 2007: 29). Analisis statistik deskriptif meliputi jumlah data penelitian, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*), dan *standar deviation*. Adapun analisis statistik deskriptif disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
MANDSCR	72	0,788	0,984	0,910	0,038
JADK	72	2	9	5,319	1,875
JAKA	72	3	6	3,958	1,093
KM	72	0,000	0,282	0,015	0,053
KI	72	0,259	1,000	0,700	0,193
Valid N (listwise)	72				

Sumber: Hasil Olah Data Statistik, 2017

a) *Mandatory Disclosure*

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa variabel dependen *mandatory disclosure* memiliki nilai minimum sebesar 0,788, nilai maksimum 0,984, nilai *mean* 0,910, dan nilai standar deviasi sebesar 0,038. *Mandatory Disclosure* dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Tingkat Kecenderungan *Mandatory Disclosure*

No	Interval	Frekuensi	Persentase (%)	Keterangan
1	$\geq 0,910$	38	52,78	Tinggi
2	0,800 – 0,909	32	44,44	Sedang
3	$\leq 0,790$	2	2,78	Rendah
4	Jumlah	72	100	

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa *mandatory disclosure* dari perusahaan perbankan yang menjadi subjek penelitian sebagian besar berada pada kategori tinggi yaitu sebesar 52,78 %.

b) Jumlah Anggota Dewan Komisaris

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa jumlah anggota dewan komisaris memiliki nilai minimum sebesar 2, nilai maksimum 9, nilai *mean* 5,319, dan nilai standar deviasi sebesar 1,875. Jumlah anggota dewan komisaris dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Tingkat Kecenderungan Jumlah Anggota Dewan Komisaris

No	Interval	Frekuensi	Persentase (%)	Keterangan
1	≥ 6	32	44,44	Banyak
2	4-5	22	30.56	Sedang
3	≤ 3	18	25	Sedikit
4	Jumlah	72	100	

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah anggota dewan komisaris dari perusahaan perbankan yang menjadi subjek penelitian sebagian besar berada pada kategori sedikit yaitu sebesar 44,44 %.

c) Jumlah Anggota Komite Audit

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa jumlah anggota komite audit memiliki nilai minimum sebesar 3, nilai maksimum 6, nilai *mean* 3,958, dan nilai standar deviasi sebesar 1,093. Jumlah anggota komite audit dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5. Tingkat Kecenderungan Jumlah Anggota Komite Audit

No	Interval	Frekuensi	Persentase (%)	Keterangan
1	≥ 6	11	15,28	Banyak
2	4-5	28	38,89	Sedang
3	≤ 3	33	45,83	Sedikit
4	Jumlah	72	100	

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah anggota komite audit dari perusahaan perbankan yang menjadi subjek penelitian sebagian besar berada pada kategori sedikit yaitu sebesar 45,83 %.

d) **Kepemilikan Manajerial**

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa kepemilikan manajerial memiliki nilai minimum sebesar 0,000, nilai maksimum 0,282, nilai *mean* 0,015, dan nilai standar deviasi sebesar 0,053. Kepemilikan manajerial dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6. Tingkat Kecenderungan Kepemilikan Manajerial

No	Interval	Frekuensi	Persentase (%)	Keterangan
1	$\geq 0,016$	4	5,56	Tinggi
2	0,004 – 0,015	16	22,22	Sedang
3	$\leq 0,003$	52	72,22	Rendah
4	Jumlah	72	100	

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial dari perusahaan perbankan yang menjadi subjek penelitian sebagian besar berada pada tingkat rendah yaitu sebesar 72,22 %.

e) **Kepemilikan Institusional**

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa kepemilikan institusional memiliki nilai minimum sebesar 0,259, nilai maksimum 1,000, nilai *mean* 0,700, dan nilai standar deviasi sebesar 0,193. Kepemilikan institusional dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7. Tingkat Kecenderungan Kepemilikan Institusional

No	Interval	Frekuensi	Persentase (%)	Keterangan
1	$\geq 0,710$	37	51,39	Tinggi
2	0,410 – 0,700	28	38,89	Sedang
3	$\leq 0,400$	7	9,72	Rendah
4	Jumlah	72	100	

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional dari perusahaan perbankan yang menjadi subjek penelitian sebagian besar berada pada tingkat tinggi yaitu sebesar 51,39 %.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui bahwa data yang telah dikumpulkan terdistribusi secara normal atau diambil dari populasi normal (Nazaruddin dan Tri Basuki, 2016). Uji normalitas perlu dilakukan karena dalam analisis statistic parametric data harus berdistribusi normal. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov*. Hasil uji normalitas menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* disajikan dalam tabel:

Tabel 8. Hasil Uji Normalitas

	<i>Unstandardized Residual</i>	Keterangan
N	72	Data berdistribusi normal
<i>Kolmogorov-Smirnov</i>	0,845	
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,473	

Sumber : Hasil Olah Data Statistik, 2017

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* pada tabel 8 menunjukkan besarnya nilai *Kolmogorov-Smirnov* untuk *Unstandardized Residual* adalah 0,845 dengan *Asymp. Sig (2-tailed)* 0,473. Syarat pengambilan keputusan bahwa suatu data berdistribusi normal apabila nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* di atas 0,05. Jadi, dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Uji multikolinearitas merupakan salah satu syarat untuk pengujian regresi berganda. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Multikolinearitas dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila nilai VIF lebih besar dari ($VIF > 10$) menunjukkan adanya gejala multikolinearitas. Sedangkan, jika nilai VIF mendekati satu ($VIF > 10$) serta nilai tolerance tidak kurang dari 0,10 menunjukkan tidak adanya gejala multikolinearitas.

Berikut merupakan hasil dari uji multikolinearitas:

Tabel 9. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF	Kesimpulan
JADK	0,836	1,196	Tidak terjadi Multikolinearitas
JAKA	0,909	1,101	Tidak terjadi Multikolinearitas
KM	0,758	1,319	Tidak terjadi Multikolinearitas
KI	0,706	1,417	Tidak terjadi Multikolineritas

Sumber: Hasil Olah Data Statistik 2017

Tabel 9 di atas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* untuk semua variabel independen dalam penelitian ini memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinearitas dan model regresi ini layak untuk digunakan.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui adanya korelasi secara linear antara kesalahan pengganggu t dengan kesalahan periode $t-1$ (sebelumnya). Untuk mengetahui apakah pada model regresi mengandung autokorelasi dapat digunakan pendekatan D-W (*Durbin Watson*) dengan kriteria $D-U < D-W < 4-D-U$.

Berikut hasil uji autokorelasi dengan uji *Durbin-Watson*:

Tabel 10. Hasil Uji Autokorelasi

Model	Nilai <i>Durbin Watson</i>	Kesimpulan
1	1,957	Tidak Terjadi Autokorelasi

Sumber: Hasil Olah Data Statistik 2017

Berdasarkan tabel 10, hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai *Durbin-Watson* sebesar 1,957. Nilai tersebut berada pada daerah $du < dw < 4-du$ yaitu $1,7688 < 1,957 < 2,2312$, sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini terbebas dari autokorelasi.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji terjadinya perbedaan *variance-variance* dari residual pengamatan satu ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas atau homoskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas menggunakan uji *glejser*. Jika nilai signifikansi lebih besar dari α (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa data tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut hasil pengujian heteroskedastisitas menggunakan uji *glejser*:

Tabel 11. Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig	Kesimpulan
JADK	0,900	Tidak ada Heteroskedastisitas
JAKA	0,206	Tidak ada Heteroskedastisitas
KM	0,462	Tidak ada Heteroskedastisitas
KI	0,497	Tidak ada Heteroskedastisitas

Sumber: Hasil Olah Data Statistik 2017

Berdasarkan tabel 11 di atas dapat dilihat bahwa hasil uji *glejser* diketahui bahwa nilai signifikansi variabel Jumlah Anggota

Dewan Komisaris, Jumlah Anggota Komite Audit, Kepemilikan Manajemen, dan Kepemilikan Institusional lebih besar dari α (0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada keempat variabel tersebut.

3. Pengujian Hopotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Analisis regresi ganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai indikator. Adapun hasil dari pengujian hipotesis pertama sampai kelima sebagai berikut:

Tabel 12. Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Kesimpulan
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	0,932	0,023		41,375	0,000	
JADK	0,008	0,002	0,410	3,747	0,000	Diterima
JAKA	0,012	0,004	0,331	3,150	0,002	Diterima
KM	0,304	0,083	0,423	3,677	0,000	Diterima
KI	0,024	0,024	0,120	1,009	0,316	Ditolak

Sumber: Hasil Olah Data Statistik 2017

Berdasarkan pengujian tabel 12 dapat dirumuskan model regresi sebagai berikut :

$$\text{MANDSCR} = 0,932 + 0,008 (\text{JADK}) + 0,012 (\text{JAKA}) + 0,304 (\text{KM}) + 0,024 (\text{KI}) + e$$

Berdasarkan tabel 12 dapat dihasilkan uji nilai t sebagai berikut:

a. Pengujian Hipotesis Pertama

H1 = Jumlah Anggota Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure*

Hipotesis pertama dalam penelitian ini menyatakan bahwa jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Berdasarkan hasil uji hipotesis pertama dalam tabel 12, diperoleh koefisien untuk variabel jumlah anggota dewan komisaris sebesar 0,008 dan nilai t hitung untuk variabel ini sebesar 3,747 dengan nilai signifikan 0,000, dimana nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 ($\alpha=0,05$). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* sehingga hipotesis pertama diterima.

b. Pengujian Hipotesis Kedua

H2 = Jumlah Anggota Komite Audit berpengaruh positif terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure*

Hipotesis kedua dalam penelitian ini menyatakan bahwa jumlah anggota komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Berdasarkan hasil uji hipotesis pada tabel 12, diperoleh koefisien untuk variabel jumlah anggota komite audit sebesar 0,012 dan nilai t hitung untuk variabel ini sebesar 3,150 dengan nilai signifikan 0,002, dimana nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 ($\alpha=0,05$). Dari hasil tersebut

dapat disimpulkan bahwa jumlah anggota komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* sehingga hipotesis kedua diterima.

c. Pengujian Hipotesis Ketiga

H3 = Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure*

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Berdasarkan hasil uji hipotesis pertama dalam tabel 12, diperoleh koefisien untuk variabel kepemilikan manajerial sebesar 0,304 dan nilai t hitung untuk variabel ini sebesar 3,677 dengan nilai signifikan 0,000, dimana nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 ($\alpha=0,05$). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* sehingga hipotesis ketiga diterima.

d. Pengujian Hipotesis Keempat

H4 = Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure*

Hipotesis keempat dalam penelitian ini menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Berdasarkan hasil uji hipotesis pertama dalam tabel 12, diperoleh koefisien untuk variabel

kepemilikan institusional sebesar 0,024 dan nilai t hitung untuk variabel ini sebesar 1,009 dengan nilai signifikan 0,316, dimana nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 ($\alpha=0,05$). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* sehingga hipotesis keempat ditolak.

e. Pengujian hipotesis kelima

H5 = Jumlah Anggota Dewan Komisaris, Jumlah Anggota Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Institusional secara simultan berpengaruh positif terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure*

Pengujian hipotesis kelima ini menggunakan uji nilai F. Uji nilai F sendiri digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat (Ghozali, 2011). Dalam pengujian ini kesimpulan dapat diperoleh dengan menilai probabilitas signifikan kurang dari 0,05 maka variabel independen bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Berikut merupakan hasil dari uji nilai F:

Tabel 13. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Model	F Hitung	Sig.
<i>Regression</i>	8,180	0,000

Sumber: Hasil Olah Data Statistik, 2017

Berdasarkan hasil analisis di atas, terlihat bahwa F Hitung pada model tersebut sebesar 8,180 dengan signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut menunjukkan kurang dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa semua variabel independen yang terdiri dari jumlah anggota dewan komisaris, jumlah anggota komite audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional secara bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* pada sektor perbankan di Indonesia, sehingga hipotesis kelima diterima.

f. Uji koefisien determinasi (*Adjusted R Square*).

Pengujian ini dilakukan menggunakan uji koefisien determinasi (*Adjusted R Square*). *R square* (R^2) adalah seberapa besar kecocokan variabel atau seberapa besar variabel independen menerangkan variabel dependen (Nazaruddin dan Tri Basuki, 2016). Nilai dari *R square* ditentukan dengan nilai *Adjusted R Square*. Berikut hasil dari uji *Adjusted R Square*:

Tabel 14. Hasil Uji *Adjusted R Square*

Model	<i>Adjusted R Square</i>
1	0,288

Sumber: Hasil Olah Data Statistik, 2017

Pada tabel 14 diketahui bahwa nilai *Adjusted R²* adalah 0,228. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari jumlah anggota dewan komisaris, jumlah anggota komite audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional

memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*) sebesar 22,8 % sedangkan sisanya 77,2 % dijelaskan oleh variable-variabel lain di luar model regresi dalam penelitian ini.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Jumlah Anggota Dewan Komisaris terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure*

Hasil pengujian hipotesis yang pertama membuktikan bahwa jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien 0,008 pada signifikansi 0,000.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Supriyono *et al* (2014) yang menunjukkan nilai $\text{sig } 0,04 < 0,05$ sehingga dewan komisaris berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Namun penelitian ini memiliki hasil yang bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prawinandi *et al.* (2012) yang menghasilkan nilai $\text{sig. } 0,980 > 0,05$ yang menunjukkan jumlah anggota dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory discosure*. Dewan komisaris sangat berpengaruh dalam pengungkapan karena tugas utama dewan komisaris adalah

mengawasi dan mengevaluasi pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan tersebut oleh dewan direksi serta memberi nasehat kepada dewan direksi (Muntoro, 2005). Dengan adanya dewan komisaris menjadikan pengawasan atas kinerja manajemen semakin ketat sehingga akan mencegah pihak manajemen melakukan kecurangan terhadap pengungkapan laporan keuangan. Hal ini juga akan mendorong manajemen untuk mematuhi peraturan sehingga manajemen tidak memiliki peluang untuk mencari keuntungan untuk dirinya sendiri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan komisaris berada pada kategori banyak dengan persentase 44,44 %. Dengan semakin banyak jumlah anggota dewan komisaris, maka fungsi *monitoring* terhadap manajemen dapat dijalankan dengan lebih baik, sehingga perusahaan tidak didominasi oleh pihak manajemen dalam menjalankan perannya.

2. Pengaruh Jumlah Anggota Komite Audit terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure*

Hasil pengujian hipotesis yang kedua membuktikan bahwa jumlah anggota komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien 0,012 pada signifikansi 0,002.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Supriyono *et al* (2014) yang menunjukkan bahwa komite audit memiliki nilai sig $0,03 < 0,05$ yang berarti komite audit berpengaruh secara

signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Penelitian ini memiliki hasil yang bertentangan dengan penelitian M. Hafiz *et al* (2015) yang menghasilkan nilai sig. ($0,621 > 0,05$), yang artinya variabel jumlah anggota komite audit tidak signifikan dan berpengaruh positif terhadap *mandatory disclosure*.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis penelitian menyatakan jumlah anggota komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Bahwa komite Audit terbukti dapat membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan oleh manajemen untuk memenuhi peraturan yang berlaku. Jumlah anggota Komite Audit juga dapat meningkatkan kepatuhan *mandatory disclosure* dikarenakan dengan jumlah anggota komite audit yang banyak, pengawasan yang dilakukan komite audit akan semakin ketat yang akhirnya akan dapat meningkatkan kepatuhan perusahaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah anggota komite audit sebagian besar berada pada kategori rendah dengan persentase 45,83 %, namun komite audit berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Dengan adanya komite audit, diharapkan laporan keuangan yang dihasilkan dapat bebas dari manipulasi. Komite audit berperan sebagai pengawas, pemeriksa serta dapat mendorong manajemen untuk mengungkapkan laporan keuangan, sehingga

semakin banyak jumlah anggota komite audit akan meningkatkan kepatuhan pengungkapan.

3. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure*

Hasil pengujian hipotesis yang ketiga membuktikan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien 0,304 pada signifikansi 0,000.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Septri dan Wahidawati (2015) yang memiliki nilai t hitung sebesar 3,138 dan nilai sig. $0,002 < 0,05$ yang berarti kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Intan Alvionita *et al* (2015) yang memiliki koefisien β positif sebesar 0,112918, nilai t hitung sebesar 1,962646 dan nilai sig. $0,051 > 0,05$ yang berarti kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Bahwa komisaris yang memiliki saham perusahaan memiliki insentif lebih besar untuk melakukan *monitoring* sehingga akan mengurangi kecurangan dalam laporan keuangan (Beasley, 1996). Oleh karena itu, dengan adanya kepemilikan

manajerial dalam suatu perusahaan maka tingkat kepatuhan pengungkapan dalam laporan keuangan akan semakin tinggi. Hal ini juga disebabkan karena manajemen tidak hanya berperan sebagai pengelola perusahaan melainkan juga berperan sebagai pemegang saham.

Manajemen akan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan usaha yang dilakukan dengan melakukan pengungkapan yang diwajibkan dalam laporan keuangan perusahaan. Manajemen akan berusaha untuk memberikan informasi tentang perusahaan dengan mengungkapkannya dalam laporan keuangan. Pengungkapan yang dilakukan menunjukkan bahwa manajemen telah bertanggung jawab atas perannya sebagai pengelola perusahaan maupun sebagai pemegang saham.

Hasil penelitian menunjukkan kepemilikan manajerial sebagian besar berada pada kategori rendah dengan persentase 72,22 %, namun kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Manajemen selain sebagai pengelola perusahaan juga sebagai pemegang saham, sehingga dengan semakin banyaknya kepemilikan manajerial maka manajemen akan semakin berusaha untuk meningkatkan kinerjanya dalam memenuhi kepentingan pemegang saham. Dengan adanya kepemilikan manajerial kemungkinan adanya tindak manipulasi pada laporan keuangan akan semakin kecil, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan *mandatory disclosure* dalam laporan keuangan.

4. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tingkat Kepatuhan

Mandatory Disclosure

Hasil pengujian hipotesis yang keempat membuktikan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien 0,024 pada signifikansi 0,316.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmadhani (2016) yang memiliki hasil nilai koefisien regresi negatif sebesar -0,013 dengan nilai signifikansi sebesar $0,475 > 0,05$ sehingga kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulan *et al* (2012) yang memiliki *p-value* sebesar 0,028 pada tingkat signifikansi 0,05 dan memiliki koefisien positif sebesar 0,062 yang berarti kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Hal ini dimungkinkan karena pihak institusi sebagai pemilik tidak begitu memperhatikan tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* yang dilakukan perusahaan tetapi lebih memperhatikan informasi-informasi yang penting seperti neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan

catatan atas laporan keuangan yang mengungkapkan utang piutang termasuk kredit bank dan daftar penyertaan modal untuk pengambilan keputusan yang akan dilakukan.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori *Stakeholders* yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus mampu memberikan manfaat bagi *stakeholders*-nya. Teori *stakeholder* dapat mempengaruhi perusahaan atau entitas untuk mengungkapkan laporan tahunannya secara luas dan transparan, karena suatu bidang usaha membutuhkan bantuan dari pihak lain untuk meneruskan kegiatan operasionalnya. Menurut Lee *et al.*, dalam Rachmawati dan Triatmoko (2007), investor institusional adalah pemilik sementara (*transfer owner*) sehingga hanya terfokus pada laba sekarang (*current earnings*). Perubahan laba sekarang dapat mempengaruhi keputusan investor institusional dalam pengambilan keputusan dalam penanaman saham. Karena kepemilikan institusional termasuk dalam pemegang saham tersebar, maka jika mereka menarik sahamnya akan mempengaruhi nilai perusahaan, sehingga kepemilikan institusional belum mampu mempengaruhi tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Selain itu, pihak institusi sebagai pemilik merasa tidak bertanggung jawab terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* karena hanya menggunakan hasil akhir dari laporan keuangan dan bukan sebagai pembuat laporan keuangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional sebagian besar berada pada kategori tinggi dengan persentase 51,39 % namun kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Institusi pada hakikatnya tidak melakukan pengawasan penuh terhadap perusahaan sehingga manajer dapat mengambil keputusan yang lebih leluasa didalam pengelolaan perusahaan. Kepemilikan institusional dimungkinkan tidak telalu memperhatikan tingkat kepatuhan pengungkapan dan hanya menggunakan hasil akhir pada laporan keuangan.

5. Pengaruh Jumlah Anggota Dewan Komisaris, Jumlah Anggota Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Institusional secara simultan terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure*

Hasil penelitian ini menunjukkan hipotesis yang kelima yaitu jumlah anggota dewan komisaris, jumlah anggota komite audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional secara simultan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Dari hasil analisis regresi berganda dengan menggunakan alpha sebesar 5 % (0,05) diperoleh nilai F sebesar 8,180 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis kelima diterima.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa variabel jumlah anggota dewan komisaris, jumlah anggota komite audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional secara bersama-sama

berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Hasil dari analisis linier berganda variabel jumlah anggota dewan komisaris, jumlah anggota komite audit, dan kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* dan variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.

Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* berada pada kategori tinggi dengan persentase 52,78 %. Tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* tertinggi dimiliki oleh PT Bank Negara Indonesia Tbk dengan tingkat kepatuhan sebesar 98,43 % sedangkan tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* terendah dimiliki oleh PT Bank Capital Indonesia Tbk dan PT Bank Mayapada Internasional Tbk dengan tingkat kepatuhan sebesar 78,82 %.

D. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah diusahakan untuk dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah, namun demikian masih memiliki keterbatasan. Keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini antara lain:

1. Periode penelitian hanya sebatas tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 saja, sehingga sampel yang didapat per periode hanya 12 perusahaan. Hal tersebut dikarenakan dari seluruh populasi dalam periode tersebut hanya sedikit perusahaan yang menerapkan kepemilikan manajerial dalam perusahaan, dimana kepemilikan manajerial menjadi salah satu mekanisme tata kelola perusahaan yang digunakan dalam penelitian.

2. Berdasarkan hasil uji nilai *Adjusted R Square* menunjukkan hasil 0,228. Hal ini menunjukkan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen hanya sebesar 22,8 % dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.
3. Penelitian ini hanya menggunakan proksi dari tata kelola perusahaan antara lain jumlah anggota dewan komisaris dan jumlah anggota komite audit, sedangkan proksi kepemilikan saham hanya diwakili kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Dalam perusahaan, khususnya perusahaan perbankan terdapat variasi jenis mekanisme tata kelola perusahaan dan kepemilikan saham yang lain, sehingga variabel dalam penelitian ini belum mewakili seluruh jenis mekanisme tata kelola perusahaan dan kepemilikan saham dalam perusahaan perbankan.
4. Penelitian ini hanya menggunakan sampel dari 12 perusahaan perbankan dalam periode 6 tahun. Jumlah sampel tersebut hanya sebagian kecil dari perusahaan yang terdaftar di BEI sehingga tidak mencakup seluruh jenis perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sehingga besar kemungkinan sampel tidak mampu mempresentasikan populasi dengan baik.
5. Penelitian ini tidak mempertimbangkan variabel kepemilikan saham yang lain, misal kepemilikan saham asing atau kepemilikan saham pemerintah, karena dari banyaknya populasi dalam penelitian ini, hanya sedikit perusahaan yang memiliki kepemilikan manajerial, sehingga sampel yang didapat hanya sedikit.

6. Untuk variabel komite audit hanya diukur dengan jumlah anggota komite audit saja, hal ini memiliki kelemahan karena setelah dilakukan pengolahan data ditemukan bahwa rata-rata setiap perusahaan memiliki jumlah anggota komite audit yang hampir sama.
7. Penelitian ini hanya menggunakan jenis perusahaan perbankan, sehingga hasil penelitian tidak bisa digeneralisasi untuk jenis industri atau perusahaan lain karena tiap perusahaan belum tentu mengungkapkan item yang sama karena kepatuhan tiap perusahaan berbeda-beda.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian mengenai pengaruh tata kelola perusahaan dan struktur kepemilikan terhadap tingkat kepatuhan *Mandatory Disclosure* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai berikut:

1. Jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2010-2015. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 berarti terdapat pengaruh positif signifikan serta nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($3,747 > 1,66792$).
2. Jumlah anggota komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2010-2015. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,002 lebih kecil dari 0,05 berarti terdapat pengaruh positif serta nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($3,3150 > 1,66792$).
3. Kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2010-2015. Hal ini ditunjukkan dengan nilai

signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 berarti terdapat pengaruh positif serta nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($3,677 > 1,66792$).

4. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2010-2015. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,316 lebih besar dari 0,05 berarti tidak terdapat pengaruh serta nilai t hitung lebih kecil dari t tabel ($1,009 < 1,66792$).
5. Jumlah anggota dewan komisaris, jumlah anggota komite audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2010-2015. Hal ini ditunjukkan dengan nilai F hitung lebih besar dari F tabel ($8,180 > 2,51$) serta nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan, dan beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, maka saran-saran yang dapat diberikan peneliti untuk penelitian selanjutnya antara lain:

1. Bagi Pihak-Pihak Terkait

a. Bagi Perusahaan

- 1) Dalam periode pengamatan yang dilakukan tingkat kepatuhan *Mandatory Disclosure* sebagian besar berada pada kategori tinggi sebesar 52,78 % namun belum maksimal, sehingga perusahaan harus lebih memperhatikan informasi yang

seharusnya diungkapkan dalam laporan keuangan agar tingkat kepatuhan *Mandatory Disclosure* dalam perusahaan dapat meningkat.

- 2) Beberapa proksi dari tata kelola perusahaan berpengaruh terhadap kepatuhan *mandatory disclosure*, oleh karena penting bagi pemilik, manajemen dan dewan komisaris memperhatikan tata kelola perusahaan secara serius, sehingga ketaatan dalam pengungkapan dapat meningkat.

b. Bagi BAPEPAM

- 1) Berdasarkan hasil penelitian, rata-rata tingkat kepatuhan *Mandatory Disclosure* pada perusahaan perbankan yang menjadi subjek penelitian baru mencapai 90,97 %, sehingga BAPEPAM harus lebih memperhatikan ketaatan perusahaan dalam mengungkapkan informasi dalam laporan keuangan agar tingkat kepatuhan *Mandatory Disclosure* dapat meningkat, termasuk penerapan sanksi yang tegas terhadap perusahaan yang belum patuh terhadap peraturan Undang-Undang yang berlaku.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Berdasarkan hasil penelitian, model regresi linear dalam penelitian menghasilkan nilai *Adjusted R Square* yang masih relatif rendah yaitu sebesar 0,228. Oleh karena itu hendaknya penelitian selanjutnya meneliti variabel-variabel lain yang berpengaruh

terhadap tingkat kepatuhan *Mandatory Disclosure* pada perusahaan di Indonesia.

- b. Periode pengamatan yang digunakan sebaiknya diperpanjang sehingga sampel yang didapat bisa lebih banyak dan hasil penelitian yang diperoleh lebih akurat dibandingkan dengan periode pengamatan dalam penelitian ini yang hanya 6 tahun.
- c. Dalam penelitian ini proksi tata kelola perusahaan hanya menggunakan jumlah anggota dewan komisaris dan jumlah anggota komite audit, sedangkan kepemilikan saham hanya kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional, sehingga peneliti selanjutnya menambahkan proksi tata kelola perusahaan yang lain selain yang telah digunakan dalam penelitian ini misalnya aktivitas rapat dewan komisaris, rapat komite audit atau kepemilikan asing yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* dalam perusahaan yang ada di Indonesia.
- d. Menambahkan sampel dan jenis perusahaan yang lebih besar lagi dan bukan hanya dari perusahaan perbankan dimana tidak dapat menggambarkan seluruh jenis perusahaan yang ada di Indonesia dan agar dapat mengetahui tentang tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* secara merata di seluruh perusahaan *go public*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adina, P., dan P. Ion. (2008). Aspect Regarding Corporate Mandatory and Voluntary Disclosure. *Journal Annals Faculty of Economics* 3(1): 1407-1411.
- Al-Akra, M., I.A. Eddie & M.J. Ali. (2010). The Influence of The Introduction of Accounting Disclosure Regulation on Mandatory Disclosure Compliance: Evidence from Jordan. *The British Accounting Review*(42): 170–186.
- Alvionita, Intan & Salma Taqwa. (2015). Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Mekanisme Corporate Governance terhadap Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure. *Jurnal SNEMA Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang* : 591-599.
- Aprianingsih, Astri. (2016). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance, Struktur Kepemilikan, dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014. *Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Astasari, Kristiana G. A & Yeterina W. N. (2015). Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Komite Audit, dan Kualitas Audit Terhadap Luas Pengungkapan Kompensasi Manajemen Kunci Di Laporan Keuangan. *Jurnal Manajemen* 10(2): 166-169.
- Barako, D.G. (2007). Determinants of Voluntary Disclosures in Kenyan Companies Annual Reports. *African Journal of Business Management* 1(5): 113-128.
- Beasley, M.S. (1996). An Empirical Analysis of the Relation Between the Board of Direction Composition and Financial Statement Fraud. *The Accounting Review* 71(4): 443-465.
- Beiner, S., W. Drobetz., F. Schmid & H. Zimmermann. (2003). Is Board Size An Independent Corporate Governance Mechanism?: *Working Paper* No.89.
- Belkaoui, Ahmed Riahi. (2007). *Accounting Theory: Buku Satu dan Dua*. Jakarta: Salemba Empat.
- Boediono, G.S.B. (2005). Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Dampak Manajemen Laba Dengan Menggunakan Analisis Jalur. *Simposium Nasional Akuntansi VIII Solo*.
- Chariri, Anis dan Firman Aji Nugroho. (2009). Retorika dalam Pelaporan Corporate Social responsibility: Analisis Semiotik atas Sustainability Reporting PT Aneka Tambang Tbk. *Disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi XII Palembang*.

- Cowen, T.E.(1992). The Impact of Size, Stock Market Listing and Industry Type on Disclosure in the Annual Reports of Japanese Listed Companies. *Accounting and Bussiness Research* 22: 229-237.
- Clemente, A.G. dan B.N. Labat. (2005). Corporate Governance Mechanisms and Voluntary Disclosure: The Role of Independent Directors in The Boards of Listed Spanish Firm.
- Denis, D.K., dan J.J McConell. (2003). International Corporate Governance. *Journal Of Financial Quantitative Analysis*(38): 1-36.
- Eisenhardt, Kathleem. M. (1989). Agency Theory: An Assesment and Review. *Academy of Management Review* 14: 57-74.
- Eng, L.L. & Y.T. Mak. (2003). Corporate Governance and Voluntary Disclosure. *Journal of Accounting and Public Policy* (22): 325–345.
- Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI). (2001). Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance.
- Ghozali, Imam., Anis Chariri. (2007). *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunawan, Barbara & Eka R. H. (2016). Peran Struktur Corporate Governance Dalam Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib Periode Setelah Konvergensi IFRS. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 1(1): 71-83.
- Herawaty, Vinola. (2008). Peran Praktek Corporate Governance sebagai Moderating Variabel dari Pengaruh Earnings Management Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 10(2).
- Herwidiyatmo. (2000). Implementtasi Good Corporate Governance untuk Perusahaan Publik Indonesia. *Usahawan/tahun XXIX* (10): 25-32.
- Husain Umar. (2011). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers
- Indriyani, Fauziah Lina. (2014). Analisis Pengaruh Struktur Kepemilikan, Komisaris Independen, dan Ukuran Perusahaan terhadap Risk Disclosure. *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Istianingrum, Andian A. (2016). Th Practice Of Mandatory Disclosure In Indoensia Determinants And Impact. *ICEBESS*: 43-62.

- Istiqomah, S.R.N., dan Pujiati, D. (2015). Pengaruh Struktur Corporate Governance terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib IFRS pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. *Proceding Simposium Nasional Akuntansi* 32(2): 1-18.
- Jensen, M.C. and Meckling, W.H. 1976. The Theory of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure, *Journal of Financial Economics*, (3): 305-360.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance*.
- Muntoro, R.K. (2006). Membangun Dewan Komisaris yang Efektif. *Jurnal Manajemen Usahawan Indonesia* 36 (11): 9-14.
- M, Hafiz.R.M et al. (2015). Pengaruh Struktur *Corporate Governance* terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib *Konvergensi IFRS* pada Laporan Laba Rugi Komprehensif. *Proceeding Simposius Nasional Akuntansi*, Vol. 29 No. 2: 1-25.
- Nafisah, U. (2011). Peran Corporate Governance Dalam Kepatuhan Pengungkapan Wajib: Studi Empiris Badan Usaha Milik Negara. *Skripsi*. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Nasution, M., dan D. Setiawan. (2007). Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Manajemen Laba di Industri Perbankan Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi X Makassar*: 126.
- Nazaruddin, I. dan Basuki T.A. (2016). *Analisis Statistik dengan SPSS*. Sleman: Danisa Media
- Na'im, Ainun dan Fu'ad Rakhman. (2000). Analisis Hubungan antara Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan dengan Struktur Modal dan Tipe Kepemilikan Perusahaan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*. 15 (1):70-82.
- Owalabi, S.A dan Dada, S. O. (2011). Audit Comittee: An Instrument of Effective Corporate Governance. *European Journal of Economics, Finance & Administrative Sciences* 35: 173-183
- Pitasari, A. & Septiani, A. (2014). Analisis Pengaruh Struktur Corporate Governance terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Konvergensi IFRS pada Laporan Laba Rugi Komprehensif. *Diponegoro Journal of Accounting* 3(02): 1-9.
- Prawinandi, W., Suhardjanto, D., dan H. Triatmoko. (2012). Peran Struktur Corporate Governance dalam Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure

- Konvergensi IFRS. *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XV*. Banjarmasin :Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
- Rafifah, Ula Restu. (2015). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance terhadap Pengungkapan Sukarela Laporan Tahunan. *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Rachmawati, Farwa. (2017). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance terhadap Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Rahmadhani. (2016). Pengaruh Struktur Corporate Governance terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*.
- Rahmawati, E. dan Sutyok. (2014). Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi Ifrs di Perbankan. *Jurnal Akuntansi dan Investasi* 15 (2): 152-162.
- Rouf, M.A., Al Harun,A. (2011). Ownership Structure and Voluntary Disclosure in Annual Reports of Bangladesh 5(1): 129-139.
- Rustiarini, N. W. (2011). Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham pada Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*. 6 (1): 1-24.
- Solomon, Jill. (2007). *Corporation Governance and Accountability*. 2nd Edition John Wiley & Sons Ltd.
- Sugiyono. (2011). *Mettode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhardjanto, D., dan A. N. Afni. (2009). Praktik Corporate Disclosure di Indonesia. Studi Empiris di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi* 14 (2): 125-139.
- (2010). *Corporate Governance*, Karakteristik Perusahaan dan *Enviromental Disclosure*. *Jurnal Akuntansi* 6 (1): 46.
- ., dan A. Dewi. (2011). Pengungkapan Risiko Finansial dan Tata Kelola Perusahaan: Studi Empiris Perbankan Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 15 (1): 105-118.
- ., A. Dewi., Erna R., dan Firazania M. (2012). Ppengaruh Corporate Governance dalam Praktik Risk Disclosure di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Auditing* 9(1): 16-30.
- Supranto. (2008). *Statistik Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Erlangga.

- Supriyono, E. dan Suhardjanto, D., dan Akhmad Abdul Mustaqim. (2014). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure Konvergensi IFRS di Indonesia. *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XVII*. Lombok: 1-26.
- Surat Edaran Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Lampiran Nomor KEP-554/BL/2010 Tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.
-
- Lampiran Nomor
KEP-643/BL/2012 Tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.
-
- Lampiran Nomor
KEP-43/BI/2012 Tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.
- Sutedi, Adrian. (2011). *Good Governance Corporatioan*. Jakara:Salemba Empat.
- Suwardjono. (2005). *Teori Akuntansi: Perekayasaan pelaporan Keuangan*. Yogyakarta: BPFE.
- Tarjo. (2008). Pengaruh onsentrisi Kepemilikan Institusional dan Leverage terhadap Manajemen Laba, Nilai Pemegang Saham serta Cost of Equity Capital. *Simposium Nasional Akuntansi XI Pontianak*.
- Trimuharmi, Rin. (2010). Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib dalam Laoran Keuangan Perusahaan di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Skripsi*. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Tslavoutas, I.L, Evans., dan M.Smith. (2008). Compliance With IFRS Mandatory Disclosure Requirements: Exloring Methodological Issues. *Journal Managerial Auditing* 25 (8): 814-842.
- Ujiyantho, H. A., dan B. A. Pramuka. (2007). Mekanisme Corporate Governance Manajemen Laba dan Kinerja Keuangann. *Simposium Nasional Akuntansi X Makassar*: 1-26.
- Utami, W. D., Suhardjanto, D., dan S. Hartoko. (2012). Investigasi dalam Konvergensi IFRS Di Indonesia: Tingkat kepatuhan pengungkapan dan Kaitannya dengan Mekanisme Corporate Governance. *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XV*. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

LAMPIRAN

LAMPIRAN

1. Lampiran Daftar Populasi Penelitian
2. Lampiran Daftar Sampel Penelitian
3. Lampiran Variabel Independen
4. Perhitungan Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure*
5. Hasil Analisis Statistik Deskriptif
6. Hasil Uji Multikolinearitas
7. Hasil Uji Normalitas
8. Hasil Uji Autokorelasi
9. Hasil Uji Heteroskedastisitas
10. Hasil Uji t
11. Hasil Uji F
12. Hasil Uji Koefisien (R^2)
13. Daftar Item *Checklist* BAPEPAM

Lampiran 1. Daftar Populasi Penelitian

No	Nama Perusahaan	Kode
1	PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	AGRO
2	PT Bank Agris Tbk	AGRS
3	PT Bank Artos Indonesia Tbk	ARTO
4	PT Bank MNC Internasional Tbk.	BABP
5	PT Bank Capital Indonesia Tbk	BACA
6	PT Bank Central Asia Tbk	BBCA
7	PT Bank Harda Internasional Tbk.	BBHI
8	PT Bank Bukopin Tbk	BBKP
9	PT Bank Mestika Dharma Tbk.	BBMD
10	PT Bank Negara Indonesia Tbk	BBNI
11	PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk	BBNP
12	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	BBRI
13	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	BBTN
14	PT Bank Yudha Bhakti Tbk.	BBYB
15	PT Bank JTrust Indonesia Tbk.	BCIC
16	PT Bank Danamon Indonesia Tbk	BDMN
17	PT Bank Pundi Indonesia Tbk	BEKS
18	PT Bank Ganesha Tbk.	BGTG
19	PT Bank Ina Perdana Tbk.	BINA
20	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	BJBR
21	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	BJTM
22	PT Bank QNB Indonesia Tbk	BKSW
23	PT Bank Maspion Indonesia Tbk.	BMAS
24	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	BMRI
25	PT Bank Bumi Arta Tbk	BNBA
26	PT Bank CIMB Niaga Tbk	BNGA
27	PT Bank International Indonesia Tbk.	BNII
28	PT Bank Permata Tbk	BNLI
29	PT Bank Sinarmas Tbk	BSIM
30	PT Bank of India Indonesia Tbk	BSWD
31	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	BTPN
32	PT Bank Victoria International Tbk	BVIC
33	PT Bank Dinar International Tbk	DNAR
34	PT Bank Artha Graha Internasional Tbk	INPC

35	PT Bank Mayapada Internasional Tbk	MAYA
36	PT Bank Windu Kentjana International Tbk	MCOR
37	PT Bank Mega Tbk	MEGA
38	PT Bank Mitraniaga Tbk.	NAGA
39	PT Bank OCBC NISP Tbk	NISP
40	PT Bank Nationalnobu Tbk.	NOBU
41	PT Bank Pan Indonesia Tbk	PNBN
42	PT Bank Panin Syariah Tbk.	PNBS
43	PT Bank Woori Saudara Indonesia Tbk	SDRA

Sumber: www.idx.co.id

Lampiran 2. Daftar Sampel Penelitian

No	Nama Perusahaan	Kode
1	PT Bank Capital Indonesia Tbk	BACA
2	PT Bank Central Asia Tbk	BBCA
3	PT Bank Bukopin Tbk	BBKP
4	PT Bank Negara Indonesia Tbk	BBNI
5	PT Bank Danamon Indonesia Tbk	BDMN
6	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	BJBR
7	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	BMRI
8	PT Bank Sinarmas Tbk	BSIM
9	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	BTPN
10	PT Bank Mayapada Internasional Tbk	MAYA
11	PT Bank OCBC NISP Tbk	NISP
12	PT Bank Woori Saudara Indonesia Tbk	SDRA

Sumber: www.idx.co.id

Lampiran 3. Variabel Independen

No.	Tahun	Kode Efek	JADK	JAKA	KM	KI
1	2010	BACA	3	3	0.04868	0.77684
2	2011		4	3	0.04868	0.56545
3	2012		7	3	0.21614	0.39553
4	2013		4	3	0.28235	0.32945
5	2014		3	3	0.28235	0.25911
6	2015		3	3	0.07962	0.31357
7	2010	BBCA	5	4	0.00282	0.47155
8	2011		5	3	0.00268	0.47155
9	2012		5	3	0.00160	0.47538
10	2013		5	3	0.00154	0.47155
11	2014		5	3	0.00139	0.47155
12	2015		5	3	0.00139	0.47155
13	2010	BBKP	6	3	0.00306	0.76742
14	2011		5	3	0.00212	0.60788
15	2012		5	4	0.00235	0.60451
16	2013		3	4	0.00161	0.56896
17	2014		5	4	0.00151	0.59521
18	2015		5	5	0.00021	0.59521
19	2010	BBNI	7	4	0.00004	0.97930
20	2011		7	4	0.00004	0.97542
21	2012		7	4	0.00211	0.97542
22	2013		7	4	0.00207	0.97542
23	2014		8	4	0.00199	0.97751
24	2015		9	5	0.00023	0.98449
25	2010	BDMN	7	6	0.00164	0.67416
26	2011		4	4	0.00269	0.73575
27	2012		8	6	0.00269	0.65732
28	2013		8	6	0.00269	0.73958
29	2014		6	5	0.00179	0.74166
30	2015		7	4	0.00173	0.74373
31	2010	BJBR	6	3	0.00127	0.75000
32	2011		5	4	0.00025	0.75000
33	2012		4	4	0.00017	0.75042
34	2013		5	6	0.00022	0.75046
35	2014		7	6	0.00024	0.75024
36	2015		4	5	0.00024	0.82243
37	2010	BMRI	7	5	0.00047	0.65980

38	2011		7	5	0.00535	0.68132
39	2012		7	4	0.00464	0.67195
40	2013		8	6	0.00067	0.38769
41	2014		7	6	0.00060	0.99149
42	2015		8	5	0.00047	0.98871
43	2010	BSIM	3	4	0.00089	0.78023
44	2011		2	5	0.00030	0.59998
45	2012		3	5	0.00035	0.66549
46	2013		3	5	0.00030	0.59938
47	2014		3	4	0.00030	0.55996
48	2015		3	3	0.00040	0.99960
49	2010	BTPN	6	5	0.00847	0.59677
50	2011		6	5	0.00862	0.59677
51	2012		6	5	0.00850	0.57872
52	2013		6	5	0.00850	0.66260
53	2014		6	4	0.00804	0.98196
54	2015		6	3	0.00643	0.69380
55	2010	MAYA	3	3	0.00569	0.94660
56	2011		5	3	0.00097	0.92015
57	2012		5	3	0.00097	0.80502
58	2013		5	3	0.00086	0.85491
59	2014		5	3	0.00086	0.85829
60	2015		4	3	0.00673	0.87566
61	2010	NISP	8	4	0.00016	0.81905
62	2011		7	4	0.00013	0.85059
63	2012		9	4	0.00013	0.85078
64	2013		9	4	0.00013	0.85078
65	2014		8	5	0.00013	0.85078
66	2015		8	4	0.00014	0.85078
67	2010	SDRA	2	4	0.00798	0.63952
68	2011		4	3	0.00743	0.63952
69	2012		3	3	0.00538	0.31767
70	2013		3	3	0.00525	0.30367
71	2014		4	3	0.00228	0.77945
72	2015		4	4	0.00228	0.77945

Sumber: www.idx.co.id (diolah)

Lampiran 4. Perhitungan Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure*
a. *Mandatory Disclosure* tahun 2010

No	Kriteria	ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			BACA	BBCA	BBKP	BBNI	BDMN	BJBR	BMRI	BSIM	BTPN	MAYA	NISP	SDRA
1	Informasi hasil usaha	LR.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2		LR.2	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1
3		LR.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4		LR.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5		LR.5	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1
6		LR.6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7		LR.7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8		LR.8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9		LR.9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10		LR.10	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
11		LR.11	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12		LR.12	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
13		LR.13	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1
14		LR.14	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1
15		LR.15	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0
16	Informasi posisi keuangan perusahaan	LE.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17		LE.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18		LE.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19		LE.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20		LE.5	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21	Rasio keu. Perush	RKP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22	Informasi harga saham	HS.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23		HS.2	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1
24		HS.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

25		HS.4	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1
26	Obligasi dan Sukuk	OS.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
27		OS.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
28		OS.3	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0
29		OS.4	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0
30	Lap. Dewan komisaris	LDK.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
31		LDK.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
32		LDK.3	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1
33		LDK.4	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0
34	Lap.Direksi	LD.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
35		LD.2	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
36		LD.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
37		LD.4	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0
38	Tanda tangan anggota direksi dan Komisaris	TTDDDK.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
39		TTDDDK.2	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
40		TTDDDK.3	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
41		TTDDDK.4	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
42	Nama dan Almt perush.	NAP.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
43	Riwayat perusahaan	NAP.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
44	Bidang usaha	BU.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
45		BU.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
46	Struktur organisasi	SO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
47	visi dan misi	VM.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
48		VM.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
49	Identitas Dewan	IDK.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
50		IDK.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
51		IDK.3	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1
52		IDK.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

53		IDK.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
54		IDK.6	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1
55	Identitas Direksi	ID.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
56		ID.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
57		ID.3	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1
58		ID.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
59		ID.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
60		ID.6	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
61	Jumlah karyawan (Pendidikan & pelatihan karyawan	PPK.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
62		PPK.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
63		PPK.3	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
64		PPK.4	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0
65	Komposisi pemegang saham	KPS.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
66		KPS.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
67		KPS.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
68	Daftar entitas anak / Asosiasi	DEA.1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0
69		DEA.2	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1
70		DEA.3	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1
71		DEA.4	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1
72	Kronologi pencatatan saham	KPS.1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
73		KPS.2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1
74		KPS.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
75		KPS.4	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
76	Kronologi pencatatan efek lainnya	KPE.1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1
77		KPE.2	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1
78		KPE.3	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1
79		KPE.4	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1
80		KPE.5	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1

81	Nama & almt lembaga	NALPM.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
82	/profesi penunjang	NALPM.2	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0
83	pasar modal	NAPLM.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
84	Penghargaan yang diterima perusahaan	PDP.1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
85		PDP.2	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
86		PDP.3	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
87		PDP.4	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1
88	Nama & almt entitas anak	NAEA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
89	Tinjauan segmen operasi	KSO.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
90		KSO.2	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0
91		KSO.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
92		KSO.4	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0
93	Kinerja keuangan perusahaan	KKP.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
94		KKP.2	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
95		KKP.3	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
96		KKP.4	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
97		KKP.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
98	Kemampuan membyr utang&koletibilitaspiu.	KU.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
99		KU.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
100	Struktur modal & kebijakan manajemen	SMKM.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
101		SMKM.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
102	Investasi barang modal	IBM.1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
103		IBM.2	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
104		IBM.3	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0
105		IBM.4	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1
106	Peningkatan, penurunan perusahaan	PPP.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
107		PP.2	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
108	Dampak perub.harga penjualan/pend	DPHP	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1

109	Fkt yg terjadi stlh tgl LK	FSTL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
110	Prospek usaha perush	PUP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
111	Aspek pemasaran	AP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
112	Kebijakan Deviden	KD.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113		KD.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
114		KD.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
115	Realisasi penggunaan Dana	RPD.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
116		RPD.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
117		RPD.3	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0
118		RPD.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
119		RPD.5	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1
120	Informasi investasi	II.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
121		II.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
122		II.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
123	Transaksi mengandung benturan kepentingan	TMBK.1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
124		TMBK.2	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1
125		TMBK.3	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
126		TMBK.4	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1
127		TMBK.5	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1
128	Perub.pertrn prndngan	PPP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
129	Kebijakan akuntansi	KA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
130	Uraian dewan komisaris	UDK.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131		UDK.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132		UDK.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
133		UDK.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134		UDK.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
135	Uraian Direksi	UD.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
136		UD.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1

137		UD.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
138		UD.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
139		UD.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
140		UD.6	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
141	Assesment anggota DK /DD	AADKD.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
142		AADKD.2	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1
143		AADKD.3	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
144	Kebijakan remunersi bagi Direksi	KRD.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
145		KRD.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
146		KRD.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
147	Komite audit	KA.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
148		KA.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
149		KA.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
150		KA.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
151		KA.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
152		KA.6	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
153	Komite nominasi	KN.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154		KN.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
155		KN.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
156		KN.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
157		KN.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
158	Komite remunerasi	KR.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
159		KR.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
160		KR.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
161		KR.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
162		KR.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
163	Komite komite lain	KKL.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
164		KKL.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

165		KKL.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
166		KKL.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
167		KKL.5	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1
168	Tugas& fungsi sekretaris perusahaan	TFSP.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
169		TFSP.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
170		TFSP.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171		TFSP.4	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
172	Unit audit internal	UAI.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
173		UAI.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
174		UAI.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
175		UAI.4	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
176		UAI.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
177		UAI.6	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
178	Akuntan perseroan	AP.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
179		AP.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
180		AP.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
181		AP.4	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0
182	Manajemen resiko perusahaan	MRP.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
183		MRP.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
184		MRP.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
185		MRP.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
186	Sistem pengndlian Intern	SPI.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
187		SPI.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
188	CSR terkait lingk. Hidup	CSRLH.1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1
189		CSRLH.2	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
190		CSRLH.3	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0
191		CSRLH.4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1
192	CSR terkait	CSRKKK.1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1

193	ketenagakerjaan,keshtn	CSRKKK.2	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1
194	& keselamatan krja	CSRKKK.3	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0
195	CSR terkait	CSRTK.1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
196	Tanggungjawab	CSRTK.2	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1
197	Konsumen	CSRTK.3	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0
198	Perkara penting	PP.1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
199	Dihadapi	PP.2	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
200	DK dan DD	PP.3	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
201	Akses infrmsi data prsh	AIDP	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
202	Kode etik	KE.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
203		KE.2	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
204		KE.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
205		KE.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
206		KE.5	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0
207	Pengungkapan	PWS.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
208	whistleblowing system	PWS.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
209		PWS.3	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1
210		PWS.4	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0
211	Srt prnytn drksi atas tgjwb	SPDT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
212	Opini auditor independen	OAI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
213	Deskripsi Auditor	DAI.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
214	Independen	DAI.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
215		DAI.3	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
216	Lap. Keuangan lengkap	LKL.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
217		LKL.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
218		LKL.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
219		LKL.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
220		LKL.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

221		LKL.6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
222	Pengungkapan CALK	PCALK	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
223	Perbandingan profitabilitas	PP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
224	Lap. arus kas	LAK.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
225		LAK.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
226		LAK.3	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
227		LAK.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
228	Ikhtisar kebijakan akt	IKA.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
229		IKA.2	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
230		IKA.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
231		IKA.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
232		IKA.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
233	Pengungkpn transaksi pihak berelasi	PTPB.1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1
234		PTPB.2	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
235		PTPB.3	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1
236		PTPB.4	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0
237	Pengungkpn berhubungan dengan pajak	PBP.1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1
238		PBP.2	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
239		PBP.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
240		PBP.4	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1
241		PBP.5	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1
242	Pengungkapan berhubungan Aset tetap	PBAT.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
243		PBAT.2	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1
244		PBAT.3	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
245		PBAT.4	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1
246	Perkembangan terakhir SAK	PTSAK.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
247		PTSAK.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
248		PTSAK.3	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1

249	Pengungkpn	PBDP.1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
250	Brhubungan dgn	PBDP.2	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
251	Instrument keuangan	PBDP.3	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1
252		PBDP.4	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1
253		PBDP.5	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1
254	Penerbitan LK	PLK.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
255		PLK.2	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
		TOTAL	228	239	236	232	230	237	232	231	235	201	230	236
		PERSENTASE	0.8941	0.9373	0.9255	0.9098	0.9020	0.9294	0.9098	0.9059	0.9216	0.7882	0.9020	0.9255

b. Mandatory Disclosure tahun 2011

No	Kriteria	ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			BACA	BBCA	BBKP	BBNI	BDMN	BJBR	BMRI	BSIM	BTPN	MAYA	NISP	SDRA
1	Informasi hasil usaha	LR.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1
2		LR.2	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1
3		LR.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4		LR.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5		LR.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6		LR.6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7		LR.7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8		LR.8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9		LR.9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10		LR.10	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11		LR.11	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12		LR.12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13		LR.13	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14		LR.14	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
15		LR.15	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0
16	Informasi posisi keuangan perusahaan	LE.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17		LE.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18		LE.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19		LE.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20		LE.5	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21	Rasio keu. Perush	RKP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22	Informasi harga saham	HS.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23		HS.2	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0
24		HS.3	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25		HS.4	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0

26	Obligasi dan Sukuk	OS.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27		OS.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28		OS.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29		OS.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
30	Lap. Dewan komisaris	LDK.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
31		LDK.2	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
32		LDK.3	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
33		LDK.4	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0
34	Lap.Direksi	LD.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
35		LD.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
36		LD.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
37		LD.4	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0
38	Tanda tangan anggota direksi dan Komisaris	TTDDDK.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
39		TTDDDK.2	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
40		TTDDDK.3	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
41		TTDDDK.4	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
42	Nama dan Almt perush.	NAP.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
43	Riwayat perusahaan	NAP.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
44	Bidang usaha	BU.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
45		BU.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
46	Struktur organisasi	SO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
47	visi dan misi	VM.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
48		VM.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
49	Identitas Dewan	IDK.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
50		IDK.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
51		IDK.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
52		IDK.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
53		IDK.5	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0

54		IDK.6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
55	Identitas Direksi	ID.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
56		ID.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
57		ID.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
58		ID.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
59		ID.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
60		ID.6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
61	Jumlah karyawan (Pendidikan & pelatihan karyawan	PPK.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
62		PPK.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
63		PPK.3	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
64		PPK.4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0
65	Komposisi pemegang saham	KPS.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
66		KPS.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
67		KPS.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
68	Daftar entitas anak / AsosiaSI	DEA.1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
69		DEA.2	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0
70		DEA.3	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
71		DEA.4	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0
72	Kronologi pencatatan saham	KPS.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
73		KPS.2	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1
74		KPS.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
75		KPS.4	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
76	Kronologi pencatatan efek lainnya	KPE.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
77		KPE.2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1
78		KPE.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
79		KPE.4	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
80		KPE.5	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
81	Nama & almt lembaga	NALPM.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

82	/profesi penunjang	NALPM.2	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0
83	pasar modal	NAPLM.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
84	Penghargaan yang	PDP.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
85	diterima perusahaan	PDP.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
86		PDP.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
87		PDP.4	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
88	Nama & almt entitas anak	NAEA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
89	Tinjauan segmen operasi	KSO.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
90		KSO.2	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0
91		KSO.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
92		KSO.4	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0
93		KKP.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
94	Kinerja keuangan	KKP.2	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0
95	perusahaan	KKP.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
96		KKP.4	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0
97		KKP.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
98	Kemampuan membyr	KU.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
99	utang&koletibilitaspiu.	KU.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
100	Struktur modal &	SMKM.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
101	kebijakan manajemen	SMKM.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
102		IBM.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
103	Investasi barang modal	IBM.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
104		IBM.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
105		IBM.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
106	Peningkatan, penurunan	PPP.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
107	perusahaan	PP.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
108	Dampak perub.harga penjualan/pend	DPHP	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
109	Fkt yg terjadi stlh tgg LK	FSTL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

110	Prospek usaha perush	PUP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
111	Aspek pemasaran	AP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
112	Kebijakan Deviden	KD.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113		KD.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
114		KD.3	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
115	Realisasi penggunaan Dana	RPD.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
116		RPD.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
117		RPD.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
118		RPD.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
119		RPD.5	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1
120	Informasi investasi	II.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
121		II.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
122		II.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
123	Transaksi mengandung benturan kepentingan	TMBK.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
124		TMBK.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
125		TMBK.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
126		TMBK.4	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
127		TMBK.5	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
128	Perub.pertrn prndngan	PPP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
129	Kebijakan akuntansi	KA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
130	Uraian dewan komisaris	UDK.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131		UDK.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132		UDK.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
133		UDK.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134		UDK.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
135	Uraian Direksi	UD.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
136		UD.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
137		UD.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

138		UD.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
139		UD.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
140		UD.6	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141	Assesment anggota DK /DD	AADKD.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142		AADKD.2	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0
143		AADKD.3	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
144	Kebijakan remunersi bagi Direksi	KRD.1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0
145		KRD.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
146		KRD.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
147	Komite audit	KA.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
148		KA.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
149		KA.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
150		KA.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
151		KA.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
152		KA.6	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
153	Komite nominasi	KN.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154		KN.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
155		KN.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
156		KN.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
157		KN.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
158	Komite remunerasi	KR.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
159		KR.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
160		KR.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
161		KR.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
162		KR.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
163	Komite komite lain	KKL.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
164		KKL.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
165		KKL.3	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1

166		KKL.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
167		KKL.5	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0
168	Tugas& fungsi sekretaris perusahaan	TFSP.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
169		TFSP.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
170		TFSP.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171		TFSP.4	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
172	Unit audit internal	UAI.1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
173		UAI.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
174		UAI.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
175		UAI.4	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
176		UAI.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
177		UAI.6	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
178	Akuntan perseroan	AP.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
179		AP.1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
180		AP.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
181		AP.4	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1
182	Manajemen resiko perusahaan	MRP.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
183		MRP.2	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
184		MRP.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
185		MRP.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
186	Sistem pengndlian	SPI.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
187	Intern	SPI.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
188	CSR terkait lingk. Hidup	CSRLH.1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1
189		CSRLH.2	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0
190		CSRLH.3	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1
191		CSRLH.4	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1
192	CSR terkait ketenagakerjaan,keshtn	CSRKKK.1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1
193		CSRKKK.2	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1

194	& keselamatan kerja	CSRKKK.3	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
195	CSR terkait	CSRTK.1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
196	Tanggungjawab	CSRTK.2	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0
197	Konsumen	CSRTK.3	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1
198	Perkara penting	PP.1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
199	Dihadapi	PP.2	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0
200	DK dan DD	PP.3	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1
201	Akses informasi data pribadi	AIDP	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0
202	Kode etik	KE.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
203		KE.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
204		KE.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
205		KE.4	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0
206		KE.5	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
207	Pengungkapan whistleblowing system	PWS.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
208		PWS.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
209		PWS.3	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
210		PWS.4	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0
211	Sifat prasyarat pelaksanaan atas tugas	SPDT	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
212	Opini auditor independen	OAI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
213	Deskripsi Auditor Independen	DAI.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
214		DAI.2	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
215		DAI.3	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1
216	Lampiran. Keuangan lengkap	LKL.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
217		LKL.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
218		LKL.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
219		LKL.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
220		LKL.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
221		LKL.6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

222	Pengungkapan CALK	PCALK	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
223	Perbandingan profitabilitas	PP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
224	Lap. arus kas	LAK.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
225		LAK.2	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
226		LAK.3	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
227		LAK.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
228	Ikhtisar kebijakan akt	IKA.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
229		IKA.2	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
230		IKA.3	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1
231		IKA.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
232		IKA.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
233	Pengungkpn transaksi pihak berelasi	PTPB.1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1
234		PTPB.2	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
235		PTPB.3	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1
236		PTPB.4	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
237	Pengungkpn berhubungan dengan pajak	PBP.1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1
238		PBP.2	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1
239		PBP.3	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1
240		PBP.4	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1
241		PBP.5	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1
242	Pengungkapan berhubungan Aset tetap	PBAT.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
243		PBAT.2	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1
244		PBAT.3	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
245		PBAT.4	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1
246	Perkembangan terakhir SAK	PTSAK.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
247		PTSAK.2	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
248		PTSAK.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
249	Pengungkpn	PBDP.1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1

250	Brhubungan dgn Instrument keuangan	PBDP.2	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1
251		PBDP.3	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
252		PBDP.4	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
253		PBDP.5	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0
254	Penerbitan LK	PLK.1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
255		PLK.2	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0
		TOTAL	234	242	238	236	229	242	235	227	226	220	227	228
		PERSENTASE	0.9176	0.9490	0.9333	0.9255	0.8980	0.9490	0.9216	0.8902	0.8863	0.8627	0.8902	0.8941

c. Mandatory Disclosure tahun 2012

No	Kriteria	ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			BACA	BBCA	BBKP	BBNI	BDMN	BJBR	BMRI	BSIM	BTPN	MAYA	NISP	SDRA
1	Informasi hasil usaha	LR.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2		LR.2	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1
3		LR.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4		LR.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5		LR.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6		LR.6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7		LR.7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8		LR.8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9		LR.9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10		LR.10	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11		LR.11	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12		LR.12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13		LR.13	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14		LR.14	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
15		LR.15	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0
16	Informasi posisi keuangan perusahaan	LE.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17		LE.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18		LE.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19		LE.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20		LE.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21	Rasio keu. Perush	RKP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22	Informasi harga saham	HS.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23		HS.2	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0
24		HS.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25		HS.4	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0

26	Obligasi dan Sukuk	OS.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27		OS.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28		OS.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29		OS.4	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0
30	Lap. Dewan komisaris	LDK.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
31		LDK.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
32		LDK.3	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
33		LDK.4	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0
34	Lap.Direksi	LD.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
35		LD.2	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
36		LD.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
37		LD.4	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0
38	Tanda tangan anggota direksi dan Komisaris	TTDDDK.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
39		TTDDDK.2	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
40		TTDDDK.3	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
41		TTDDDK.4	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
42	Nama dan Almt perush.	NAP.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
43	Riwayat perusahaan	NAP.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
44	Bidang usaha	BU.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
45		BU.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
46	Struktur organisasi	SO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
47	visi dan misi	VM.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
48		VM.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
49	Identitas Dewan	IDK.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
50		IDK.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
51		IDK.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
52		IDK.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
53		IDK.5	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0

54		IDK.6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
55	Identitas Direksi	ID.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
56		ID.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
57		ID.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
58		ID.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
59		ID.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
60		ID.6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
61	Jumlah karyawan (Pendidikan & pelatihan karywan	PPK.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
62		PPK.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
63		PPK.3	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
64		PPK.4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0
65	Komposisi pemegang saham	KPS.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
66		KPS.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
67		KPS.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
68	Daftar entitas anak / AsosiaSI	DEA.1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
69		DEA.2	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0
70		DEA.3	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
71		DEA.4	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0
72	Kronologi pencatatan saham	KPS.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
73		KPS.2	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1
74		KPS.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
75		KPS.4	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
76	Kronologi pencatatan efek lainnya	KPE.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
77		KPE.2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1
78		KPE.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
79		KPE.4	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
80		KPE.5	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
81	Nama & almt lembaga	NALPM.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

82	/profesi penunjang	NALPM.2	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0
83	pasar modal	NAPLM.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
84	Penghargaan yang diterima perusahaan	PDP.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
85		PDP.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
86		PDP.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
87		PDP.4	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
88	Nama & almt entitas anak	NAEA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
89	Tinjauan segmen operasi	KSO.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
90		KSO.2	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0
91		KSO.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
92		KSO.4	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0
93	Kinerja keuangan perusahaan	KKP.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
94		KKP.2	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0
95		KKP.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
96		KKP.4	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0
97		KKP.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
98	Kemampuan membyr utang&koletibilitaspiu.	KU.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
99		KU.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
100	Struktur modal & kebijakan manajemen	SMKM.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
101		SMKM.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
102	Investasi barang modal	IBM.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
103		IBM.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
104		IBM.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
105		IBM.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
106	Peningkatan, penurunan perusahaan	PPP.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
107		PP.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
108	Dampak perub.harga penjualan/pend	DPHP	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
109	Fkt yg terjadi stlh tgg LK	FSTL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

110	Prospek usaha perush	PUP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
111	Aspek pemasaran	AP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
112	Kebijakan Deviden	KD.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113		KD.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
114		KD.3	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
115	Realisasi penggunaan Dana	RPD.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
116		RPD.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
117		RPD.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
118		RPD.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
119		RPD.5	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1
120	Informasi investasi	II.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
121		II.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
122		II.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
123	Transaksi mengandung benturan kepentingan	TMBK.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
124		TMBK.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
125		TMBK.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
126		TMBK.4	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
127		TMBK.5	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1
128	Perub.pertrn prndngan	PPP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
129	Kebijakan akuntansi	KA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
130	Uraian dewan komisaris	UDK.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131		UDK.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132		UDK.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
133		UDK.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134		UDK.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
135	Uraian Direksi	UD.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
136		UD.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
137		UD.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

138		UD.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
139		UD.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
140		UD.6	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141	Assesment anggota DK /DD	AADKD.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142		AADKD.2	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0
143		AADKD.3	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
144	Kebijakan remunersi bagi Direksi	KRD.1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0
145		KRD.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
146		KRD.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
147	Komite audit	KA.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
148		KA.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
149		KA.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
150		KA.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
151		KA.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
152		KA.6	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
153	Komite nominasi	KN.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154		KN.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
155		KN.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
156		KN.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
157		KN.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
158	Komite remunerasi	KR.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
159		KR.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
160		KR.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
161		KR.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
162		KR.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
163	Komite komite lain	KKL.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
164		KKL.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
165		KKL.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

166		KKL.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
167		KKL.5	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0
168	Tugas& fungsi sekretaris perusahaan	TFSP.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
169		TFSP.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
170		TFSP.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171		TFSP.4	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
172	Unit audit internal	UAL1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
173		UAL2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
174		UAL3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
175		UAL4	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
176		UAL5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
177		UAL6	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
178	Akuntan perseroan	AP.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
179		AP.1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
180		AP.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
181		AP.4	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1
182	Manajemen resiko perusahaan	MRP.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
183		MRP.2	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
184		MRP.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
185		MRP.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
186	Sistem pengndlian Intern	SPI.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
187		SPI.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
188	CSR terkait lingk. Hidup	CSRLH.1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1
189		CSRLH.2	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0
190		CSRLH.3	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1
191		CSRLH.4	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1
192	CSR terkait ketenagakerjaan,keshtn	CSRKKK.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0
193		CSRKKK.2	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0

194	& keselamatan kerja	CSRKKK.3	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1
195	CSR terkait	CSRTK.1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
196	Tanggungjawab	CSRTK.2	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0
197	Konsumen	CSRTK.3	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1
198	Perkara penting	PP.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
199	Dihadapi	PP.2	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0
200	DK dan DD	PP.3	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1
201	Akses informasi data pribadi	AIDP	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0
202	Kode etik	KE.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
203		KE.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
204		KE.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
205		KE.4	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0
206		KE.5	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
207	Pengungkapan whistleblowing system	PWS.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
208		PWS.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
209		PWS.3	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
210		PWS.4	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0
211	Sertifikasi diri atas tugas	SPDT	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
212	Opini auditor independen	OAI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
213	Deskripsi Auditor Independen	DAI.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
214		DAI.2	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
215		DAI.3	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1
216	Lampiran Keuangan lengkap	LKL.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
217		LKL.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
218		LKL.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
219		LKL.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
220		LKL.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
221		LKL.6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

222	Pengungkapan CALK	PCALK	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
223	Perbandingan profitabilitas	PP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
224	Lap. arus kas	LAK.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
225		LAK.2	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
226		LAK.3	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
227		LAK.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
228	Ikhtisar kebijakan akt	IKA.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
229		IKA.2	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
230		IKA.3	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1
231		IKA.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
232		IKA.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
233	Pengungkpn transaksi pihak berelasi	PTPB.1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
234		PTPB.2	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
235		PTPB.3	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
236		PTPB.4	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
237	Pengungkpn berhubungan dengan pajak	PBP.1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1
238		PBP.2	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1
239		PBP.3	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1
240		PBP.4	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
241		PBP.5	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1
242	Pengungkapan berhubungan Aset tetap	PBAT.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
243		PBAT.2	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1
244		PBAT.3	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
245		PBAT.4	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1
246	Perkembangan terakhir SAK	PTSAK.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
247		PTSAK.2	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
248		PTSAK.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
249	Pengungkpn	PBDP.1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1

250	Brhubungan dgn Instrument keuangan	PBDP.2	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1
251		PBDP.3	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
252		PBDP.4	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0
253		PBDP.5	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
254	Penerbitan LK	PLK.1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
255		PLK.2	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0
		TOTAL	233	241	239	233	229	241	234	227	224	227	231	225
		PERSENTASE	0.9137	0.9451	0.9373	0.9137	0.8980	0.9451	0.9176	0.8902	0.8784	0.8902	0.9059	0.8824

d. Mandatory Disclosure tahun 2013

No	Kriteria	ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			BACA	BBCA	BBKP	BBNI	BDMN	BJBR	BMRI	BSIM	BTPN	MAYA	NISP	SDRA
1	Informasi hasil usaha	LR.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2		LR.2	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0
3		LR.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4		LR.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5		LR.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6		LR.6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7		LR.7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8		LR.8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9		LR.9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10		LR.10	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1
11		LR.11	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
12		LR.12	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1
13		LR.13	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0
14		LR.14	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0
15		LR.15	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0
16	Informasi posisi keuangan perusahaan	LE.1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1
17		LE.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18		LE.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19		LE.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20		LE.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21	Rasio keu. Perush	RKP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22	Informasi harga saham	HS.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23		HS.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
24		HS.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25		HS.4	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1

26	Obligasi dan Sukuk	OS.1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
27		OS.2	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
28		OS.3	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
29		OS.4	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0
30	Lap. Dewan komisaris	LDK.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
31		LDK.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
32		LDK.3	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
33		LDK.4	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0
34	Lap.Direksi	LD.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
35		LD.2	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
36		LD.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
37		LD.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0
38	Tanda tangan anggota direksi dan Komisaris	TTDDDK.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
39		TTDDDK.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
40		TTDDDK.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
41		TTDDDK.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
42	Nama dan Almt perush.	NAP.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
43	Riwayat perusahaan	NAP.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
44	Bidang usaha	BU.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
45		BU.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
46	Struktur organisasi	SO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
47	visi dan misi	VM.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
48		VM.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
49	Identitas Dewan	IDK.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
50		IDK.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
51		IDK.3	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
52		IDK.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
53		IDK.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1

54		IDK.6	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1
55	Identitas Direksi	ID.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
56		ID.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
57		ID.3	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
58		ID.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
59		ID.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
60		ID.6	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1
61	Jumlah karyawan (Pendidikan & pelatihan karywan	PPK.1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
62		PPK.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
63		PPK.3	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
64		PPK.4	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0
65	Komposisi pemegang saham	KPS.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
66		KPS.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
67		KPS.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
68	Daftar entitas anak / AsosiaSI	DEA.1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0
69		DEA.2	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0
70		DEA.3	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
71		DEA.4	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0
72	Kronologi pencatatan saham	KPS.1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
73		KPS.2	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1
74		KPS.3	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
75		KPS.4	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
76	Kronologi pencatatan efek lainnya	KPE.1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1
77		KPE.2	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1
78		KPE.3	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1
79		KPE.4	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1
80		KPE.5	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1
81	Nama & almt lembaga	NALPM.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

82	/profesi penunjang	NALPM.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0
83	pasar modal	NAPLM.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
84	Penghargaan yang diterima perusahaan	PDP.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
85		PDP.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
86		PDP.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
87		PDP.4	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
88	Nama & almt entitas anak	NAEA	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1
89	Tinjauan segmen operasi	KSO.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
90		KSO.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0
91		KSO.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
92		KSO.4	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
93	Kinerja keuangan perusahaan	KKP.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
94		KKP.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
95		KKP.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
96		KKP.4	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
97		KKP.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
98	Kemampuan membyr utang&koletibilitaspiu.	KU.1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
99		KU.2	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1
100	Struktur modal & kebijakan manajemen	SMKM.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
101		SMKM.2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
102	Investasi barang modal	IBM.1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
103		IBM.2	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
104		IBM.3	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1
105		IBM.4	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1
106	Peningkatan, penurunan perusahaan	PPP.1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
107		PP.2	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1
108	Dampak perub.harga penjualan/pend	DPHP	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
109	Fkt yg terjadi stlh tgg LK	FSTL	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1

110	Prospek usaha perush	PUP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
111	Aspek pemasaran	AP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
112	Kebijakan Deviden	KD.1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1
113		KD.2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1
114		KD.3	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1
115	Realisasi penggunaan Dana	RPD.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
116		RPD.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
117		RPD.3	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0
118		RPD.4	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
119		RPD.5	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1
120	Informasi investasi	II.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
121		II.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
122		II.3	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1
123	Transaksi mengandung benturan kepentingan	TMBK.1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1
124		TMBK.2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1
125		TMBK.3	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1
126		TMBK.4	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1
127		TMBK.5	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1
128	Perub.pertn prndngan	PPP	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
129	Kebijakan akuntansi	KA	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
130	Uraian dewan komisaris	UDK.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131		UDK.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132		UDK.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
133		UDK.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134		UDK.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
135	Uraian Direksi	UD.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
136		UD.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
137		UD.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

138		UD.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
139		UD.5	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
140		UD.6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141	Assesment anggota DK /DD	AADKD.1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
142		AADKD.2	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0
143		AADKD.3	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
144	Kebijakan remunersi bagi Direksi	KRD.1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
145		KRD.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
146		KRD.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
147	Komite audit	KA.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
148		KA.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
149		KA.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
150		KA.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
151		KA.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
152		KA.6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
153	Komite nominasi	KN.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154		KN.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
155		KN.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
156		KN.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
157		KN.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
158	Komite remunerasi	KR.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
159		KR.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
160		KR.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
161		KR.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
162		KR.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
163	Komite komite lain	KKL.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
164		KKL.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
165		KKL.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

166		KKL.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
167		KKL.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
168	Tugas& fungsi sekretaris perusahaan	TFSP.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
169		TFSP.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
170		TFSP.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171		TFSP.4	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
172	Unit audit internal	UAL1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
173		UAL2	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
174		UAL3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
175		UAL4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
176		UAL5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
177		UAL6	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1
178	Akuntan perseroan	AP.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
179		AP.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
180		AP.3	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
181		AP.4	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
182	Manajemen resiko perusahaan	MRP.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
183		MRP.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
184		MRP.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
185		MRP.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
186	Sistem pengndlian Intern	SPI.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
187		SPI.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
188	CSR terkait lingk. Hidup	CSRLH.1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1
189		CSRLH.2	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1
190		CSRLH.3	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0
191		CSRLH.4	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1
192	CSR terkait ketenagakerjaan,keshtn	CSRKKK.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
193		CSRKKK.2	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1

194	& keselamatan krja	CSRKKK.3	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0
195	CSR terkait	CSRTK.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
196	Tanggungjawab	CSRTK.2	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1
197	Konsumen	CSRTK.3	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0
198	Perkara penting	PP.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
199	Dihadapi	PP.2	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1
200	DK dan DD	PP.3	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1
201	Akses infrmsi data prsh	AIDP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
202	Kode etik	KE.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
203		KE.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
204		KE.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
205		KE.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
206		KE.5	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
207	Pengungkapan whistleblowing system	PWS.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
208		PWS.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
209		PWS.3	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
210		PWS.4	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0
211	Srt prnytn drksi atas tgjwb	SPDT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
212	Opini auditor independen	OAI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
213	Deskripsi Auditor Independen	DAI.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
214		DAI.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
215		DAI.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
216	Lap. Keuangan lengkap	LKL.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
217		LKL.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
218		LKL.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
219		LKL.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
220		LKL.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
221		LKL.6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

222	Pengungkapan CALK	PCALK	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
223	Perbandingan profitabilitas	PP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
224	Lap. arus kas	LAK.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
225		LAK.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
226		LAK.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
227		LAK.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
228	Ikhtisar kebijakan akt	IKA.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
229		IKA.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
230		IKA.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
231		IKA.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
232		IKA.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
233	Pengungkpn transaksi pihak berelasi	PTPB.1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
234		PTPB.2	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1
235		PTPB.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
236		PTPB.4	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0
237	Pengungkpn berhubungan dengan pajak	PBP.1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
238		PBP.2	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1
239		PBP.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
240		PBP.4	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
241		PBP.5	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0
242	Pengungkapan berhubungan Aset tetap	PBAT.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
243		PBAT.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
244		PBAT.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
245		PBAT.4	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1
246	Perkembangan terakhir SAK	PTSAK.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
247		PTSAK.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
248		PTSAK.3	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1
249	Pengungkpn	PBDP.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

250	Brhubungan dgn Instrument keuangan	PBDP.2	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0
251		PBDP.3	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
252		PBDP.4	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0
253		PBDP.5	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
254	Penerbitan LK	PLK.1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
255		PLK.2	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0
		TOTAL	219	238	246	235	237	229	238	213	215	224	227	225
		PERSENTASE	0.8588	0.9333	0.9647	0.9216	0.9294	0.8980	0.9333	0.8353	0.8431	0.8784	0.8902	0.8824

e. Mandatory Disclosure tahun 2014

No	Kriteria	ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			BACA	BBCA	BBKP	BBNI	BDMN	BJBR	BMRI	BSIM	BTPN	MAYA	NISP	SDRA
1	Informasi hasil usaha	LR.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2		LR.2	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0
3		LR.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4		LR.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5		LR.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6		LR.6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7		LR.7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8		LR.8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9		LR.9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10		LR.10	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1
11		LR.11	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1
12		LR.12	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1
13		LR.13	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0
14		LR.14	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0
15		LR.15	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	Informasi posisi keuangan perusahaan	LE.1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1
17		LE.2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18		LE.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19		LE.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20		LE.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21	Rasio keu. Perush	RKP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22	Informasi harga saham	HS.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23		HS.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
24		HS.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25		HS.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

26	Obligasi dan Sukuk	OS.1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
27		OS.2	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
28		OS.3	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
29		OS.4	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1
30	Lap. Dewan komisaris	LDK.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
31		LDK.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
32		LDK.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
33		LDK.4	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0
34	Lap.Direksi	LD.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
35		LD.2	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
36		LD.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
37		LD.4	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0
38	Tanda tangan anggota direksi dan Komisaris	TTDDDK.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
39		TTDDDK.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
40		TTDDDK.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
41		TTDDDK.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
42	Nama dan Almt perush.	NAP.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
43	Riwayat perusahaan	NAP.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
44	Bidang usaha	BU.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
45		BU.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
46	Struktur organisasi	SO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
47	visi dan misi	VM.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
48		VM.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
49	Identitas Dewan	IDK.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
50		IDK.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
51		IDK.3	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
52		IDK.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
53		IDK.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

54		IDK.6	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1
55	Identitas Direksi	ID.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
56		ID.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
57		ID.3	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
58		ID.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
59		ID.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
60		ID.6	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1
61	Jumlah karyawan (Pendidikan & pelatihan karywan	PPK.1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
62		PPK.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
63		PPK.3	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
64		PPK.4	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1
65	Komposisi pemegang saham	KPS.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
66		KPS.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
67		KPS.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
68	Daftar entitas anak / AsosiaSI	DEA.1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
69		DEA.2	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1
70		DEA.3	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
71		DEA.4	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1
72	Kronologi pencatatan saham	KPS.1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
73		KPS.2	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1
74		KPS.3	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
75		KPS.4	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
76	Kronologi pencatatan efek lainnya	KPE.1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1
77		KPE.2	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1
78		KPE.3	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1
79		KPE.4	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1
80		KPE.5	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1
81	Nama & almt lembaga	NALPM.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

82	/profesi penunjang	NALPM.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
83	pasar modal	NAPLM.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
84	Penghargaan yang diterima perusahaan	PDP.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
85		PDP.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
86		PDP.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
87		PDP.4	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
88	Nama & almt entitas anak	NAEA	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1
89	Tinjauan segmen operasi	KSO.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
90		KSO.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0
91		KSO.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
92		KSO.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
93	Kinerja keuangan perusahaan	KKP.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
94		KKP.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
95		KKP.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
96		KKP.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
97		KKP.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
98	Kemampuan membyr utang&koletibilitaspiu.	KU.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
99		KU.2	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
100	Struktur modal & kebijakan manajemen	SMKM.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
101		SMKM.2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
102	Investasi barang modal	IBM.1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
103		IBM.2	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
104		IBM.3	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1
105		IBM.4	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1
106	Peningkatan, penurunan perusahaan	PPP.1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
107		PP.2	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1
108	Dampak perub.harga penjualan/pend	DPHP	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
109	Fkt yg terjadi stlh tgg LK	FSTL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

110	Prospek usaha perush	PUP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
111	Aspek pemasaran	AP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
112	Kebijakan Deviden	KD.1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
113		KD.2	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
114		KD.3	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1
115	Realisasi penggunaan Dana	RPD.1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
116		RPD.2	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
117		RPD.3	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0
118		RPD.4	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
119		RPD.5	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1
120	Informasi investasi	II.1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
121		II.2	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
122		II.3	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1
123	Transaksi mengandung benturan kepentingan	TMBK.1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1
124		TMBK.2	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1
125		TMBK.3	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1
126		TMBK.4	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1
127		TMBK.5	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1
128	Perub.pertn prndngan	PPP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
129	Kebijakan akuntansi	KA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
130	Uraian dewan komisaris	UDK.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131		UDK.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132		UDK.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
133		UDK.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134		UDK.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
135	Uraian Direksi	UD.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
136		UD.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
137		UD.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

138		UD.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
139		UD.5	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
140		UD.6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
141	Assesment anggota DK /DD	AADKD.1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
142		AADKD.2	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1
143		AADKD.3	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
144	Kebijakan remunersi bagi Direksi	KRD.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
145		KRD.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
146		KRD.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
147	Komite audit	KA.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
148		KA.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
149		KA.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
150		KA.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
151		KA.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
152		KA.6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
153	Komite nominasi	KN.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154		KN.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
155		KN.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
156		KN.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
157		KN.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
158	Komite remunerasi	KR.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
159		KR.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
160		KR.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
161		KR.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
162		KR.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
163	Komite komite lain	KKL.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
164		KKL.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
165		KKL.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

166		KKL.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
167		KKL.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
168	Tugas& fungsi sekretaris perusahaan	TFSP.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
169		TFSP.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
170		TFSP.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171		TFSP.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
172	Unit audit internal	UAL1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
173		UAL2	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
174		UAL3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
175		UAL4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
176		UAL5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
177		UAL6	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1
178	Akuntan perseroan	AP.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
179		AP.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
180		AP.3	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
181		AP.4	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
182	Manajemen resiko perusahaan	MRP.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
183		MRP.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
184		MRP.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
185		MRP.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
186	Sistem pengndlian Intern	SPI.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
187		SPI.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
188	CSR terkait lingk. Hidup	CSRLH.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
189		CSRLH.2	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1
190		CSRLH.3	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0
191		CSRLH.4	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1
192	CSR terkait ketenagakerjaan,keshtn	CSRKKK.1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1
193		CSRKKK.2	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1

194	& keselamatan krja	CSRKKK.3	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0
195	CSR terkait	CSRTK.1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1
196	Tanggungjawab	CSRTK.2	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1
197	Konsumen	CSRTK.3	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0
198	Perkara penting	PP.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
199	Dihadapi	PP.2	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1
200	DK dan DD	PP.3	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1
201	Akses infrmsi data prsh	AIDP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
202	Kode etik	KE.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
203		KE.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
204		KE.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
205		KE.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
206		KE.5	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
207	Pengungkapan whistleblowing system	PWS.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
208		PWS.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
209		PWS.3	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
210		PWS.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
211	Srt prnytn drksi atas tgjwb	SPDT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
212	Opini auditor independen	OAI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
213	Deskripsi Auditor Independen	DAI.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
214		DAI.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
215		DAI.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
216	Lap. Keuangan lengkap	LKL.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
217		LKL.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
218		LKL.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
219		LKL.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
220		LKL.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
221		LKL.6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

222	Pengungkapan CALK	PCALK	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
223	Perbandingan profitabilitas	PP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
224	Lap. arus kas	LAK.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
225		LAK.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
226		LAK.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
227		LAK.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
228	Ikhtisar kebijakan akt	IKA.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
229		IKA.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
230		IKA.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
231		IKA.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
232		IKA.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
233	Pengungkpn transaksi pihak berelasi	PTPB.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
234		PTPB.2	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1
235		PTPB.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
236		PTPB.4	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0
237	Pengungkpn berhubungan dengan pajak	PBP.1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
238		PBP.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
239		PBP.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
240		PBP.4	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
241		PBP.5	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
242	Pengungkapan berhubungan Aset tetap	PBAT.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
243		PBAT.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
244		PBAT.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
245		PBAT.4	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
246	Perkembangan terakhir SAK	PTSAK.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
247		PTSAK.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
248		PTSAK.3	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1
249	Pengungkpn	PBDP.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

250	Brhubungan dgn Instrument keuangan	PBDP.2	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
251		PBDP.3	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
252		PBDP.4	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
253		PBDP.5	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1
254	Penerbitan LK	PLK.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
255		PLK.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		TOTAL	207	241	244	236	238	229	246	228	220	221	231	238
		PERSENTASE	0.8118	0.9451	0.9569	0.9255	0.9333	0.8980	0.9647	0.8941	0.8627	0.8667	0.9059	0.9333

f. Mandatory Disclosure tahun 2015

No	Kriteria	ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			BACA	BBCA	BBKP	BBNI	BDMN	BJBR	BMRI	BSIM	BTPN	MAYA	NISP	SDRA
1	Informasi hasil usaha	LR.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2		LR.2	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1
3		LR.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4		LR.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5		LR.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6		LR.6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7		LR.7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8		LR.8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9		LR.9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10		LR.10	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11		LR.11	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12		LR.12	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
13		LR.13	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14		LR.14	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
15		LR.15	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0
16	Informasi posisi keuangan perusahaan	LE.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17		LE.2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18		LE.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19		LE.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20		LE.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21	Rasio keu. Perush	RKP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22	Informasi harga saham	HS.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23		HS.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
24		HS.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25		HS.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

26	Obligasi dan Sukuk	OS.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27		OS.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28		OS.3	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
29		OS.4	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0
30	Lap. Dewan komisaris	LDK.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
31		LDK.2	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
32		LDK.3	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
33		LDK.4	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0
34	Lap.Direksi	LD.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
35		LD.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
36		LD.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
37		LD.4	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0
38	Tanda tangan anggota direksi dan Komisaris	TTDDDK.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
39		TTDDDK.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
40		TTDDDK.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
41		TTDDDK.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
42	Nama dan Almt perush.	NAP.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
43	Riwayat perusahaan	NAP.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
44	Bidang usaha	BU.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
45		BU.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
46	Struktur organisasi	SO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
47	visi dan misi	VM.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
48		VM.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
49	Identitas Dewan	IDK.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
50		IDK.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
51		IDK.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
52		IDK.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
53		IDK.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1

54		IDK.6	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1
55	Identitas Direksi	ID.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
56		ID.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
57		ID.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
58		ID.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
59		ID.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
60		ID.6	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1
61	Jumlah karyawan (Pendidikan & pelatihan karywan	PPK.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
62		PPK.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
63		PPK.3	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
64		PPK.4	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0
65	Komposisi pemegang saham	KPS.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
66		KPS.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
67		KPS.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
68	Daftar entitas anak / AsosiaSI	DEA.1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
69		DEA.2	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
70		DEA.3	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
71		DEA.4	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1
72	Kronologi pencatatan saham	KPS.1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
73		KPS.2	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1
74		KPS.3	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
75		KPS.4	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
76	Kronologi pencatatan efek lainnya	KPE.1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1
77		KPE.2	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1
78		KPE.3	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1
79		KPE.4	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
80		KPE.5	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1
81	Nama & almt lembaga	NALPM.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

82	/profesi penunjang	NALPM.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0
83	pasar modal	NAPLM.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
84	Penghargaan yang diterima perusahaan	PDP.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
85		PDP.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
86		PDP.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
87		PDP.4	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1
88	Nama & almt entitas anak	NAEA	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
89	Tinjauan segmen operasi	KSO.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
90		KSO.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0
91		KSO.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
92		KSO.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
93	Kinerja keuangan perusahaan	KKP.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
94		KKP.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
95		KKP.3	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
96		KKP.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
97		KKP.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
98	Kemampuan membyr utang&koletibilitaspiu.	KU.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
99		KU.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
100	Struktur modal & kebijakan manajemen	SMKM.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
101		SMKM.2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
102	Investasi barang modal	IBM.1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
103		IBM.2	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1
104		IBM.3	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1
105		IBM.4	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1
106	Peningkatan, penurunan perusahaan	PPP.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
107		PP.2	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
108	Dampak perub.harga penjualan/pend	DPHP	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
109	Fkt yg terjadi stlh tgg LK	FSTL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

110	Prospek usaha perush	PUP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
111	Aspek pemasaran	AP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
112	Kebijakan Deviden	KD.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
113		KD.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
114		KD.3	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
115	Realisasi penggunaan Dana	RPD.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
116		RPD.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
117		RPD.3	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0
118		RPD.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
119		RPD.5	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1
120	Informasi investasi	II.1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
121		II.2	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
122		II.3	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
123	Transaksi mengandung benturan kepentingan	TMBK.1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
124		TMBK.2	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1
125		TMBK.3	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1
126		TMBK.4	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
127		TMBK.5	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1
128	Perub.pertn prndngan	PPP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
129	Kebijakan akuntansi	KA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
130	Uraian dewan komisaris	UDK.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
131		UDK.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132		UDK.3	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
133		UDK.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
134		UDK.5	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
135	Uraian Direksi	UD.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
136		UD.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
137		UD.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

138		UD.4	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
139		UD.5	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
140		UD.6	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
141	Assesment anggota DK /DD	AADKD.1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
142		AADKD.2	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1
143		AADKD.3	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
144	Kebijakan remunersi bagi Direksi	KRD.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
145		KRD.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
146		KRD.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
147	Komite audit	KA.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
148		KA.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
149		KA.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
150		KA.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
151		KA.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
152		KA.6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
153	Komite nominasi	KN.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
154		KN.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
155		KN.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
156		KN.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
157		KN.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
158	Komite remunerasi	KR.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
159		KR.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
160		KR.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
161		KR.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
162		KR.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
163	Komite komite lain	KKL.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
164		KKL.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
165		KKL.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

166		KKL.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
167		KKL.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
168	Tugas& fungsi sekretaris perusahaan	TFSP.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
169		TFSP.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
170		TFSP.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
171		TFSP.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
172	Unit audit internal	UAL1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
173		UAL2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
174		UAL3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
175		UAL4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
176		UAL5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
177		UAL6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
178	Akuntan perseroan	AP.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
179		AP.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
180		AP.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
181		AP.4	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
182	Manajemen resiko perusahaan	MRP.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
183		MRP.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
184		MRP.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
185		MRP.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
186	Sistem pengndlian Intern	SPI.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
187		SPI.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
188	CSR terkait lingk. Hidup	CSRLH.1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1
189		CSRLH.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
190		CSRLH.3	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0
191		CSRLH.4	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1
192	CSR terkait ketenagakerjaan,keshtn	CSRKKK.1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1
193		CSRKKK.2	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1

194	& keselamatan krja	CSRKKK.3	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
195	CSR terkait	CSRTK.1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
196	Tanggungjawab	CSRTK.2	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1
197	Konsumen	CSRTK.3	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0
198	Perkara penting	PP.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
199	Dihadapi	PP.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
200	DK dan DD	PP.3	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
201	Akses infrmsi data prsh	AIDP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
202	Kode etik	KE.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
203		KE.2	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
204		KE.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
205		KE.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
206		KE.5	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
207	Pengungkapan whistleblowing system	PWS.1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
208		PWS.2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
209		PWS.3	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1
210		PWS.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
211	Srt prnytn drksi atas tgjwb	SPDT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
212	Opini auditor independen	OAI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
213	Deskripsi Auditor Independen	DAI.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
214		DAI.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
215		DAI.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
216	Lap. Keuangan lengkap	LKL.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
217		LKL.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
218		LKL.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
219		LKL.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
220		LKL.5	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
221		LKL.6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

222	Pengungkapan CALK	PCALK	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
223	Perbandingan profitabilitas	PP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
224	Lap. arus kas	LAK.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
225		LAK.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
226		LAK.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
227		LAK.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
228	Ikhtisar kebijakan akt	IKA.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
229		IKA.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
230		IKA.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
231		IKA.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
232		IKA.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
233	Pengungkpn transaksi pihak berelasi	PTPB.1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
234		PTPB.2	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1
235		PTPB.3	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1
236		PTPB.4	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0
237	Pengungkpn berhubungan dengan pajak	PBP.1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1
238		PBP.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
239		PBP.3	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
240		PBP.4	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1
241		PBP.5	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
242	Pengungkapan berhubungan Aset tetap	PBAT.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
243		PBAT.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
244		PBAT.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
245		PBAT.4	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1
246	Perkembangan terakhir SAK	PTSAK.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
247		PTSAK.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
248		PTSAK.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
249	Pengungkpn	PBDP.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

250	Brhubungan dgn Instrument keuangan	PBDP.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
251		PBDP.3	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1
252		PBDP.4	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1
253		PBDP.5	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1
254	Penerbitan LK	PLK.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
255		PLK.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		TOTAL	201	237	238	251	235	244	248	234	238	220	232	239
		PERSENTASE	0.7882	0.9294	0.9333	0.9843	0.9216	0.9569	0.9725	0.9176	0.9333	0.8627	0.9098	0.9373

Lampiran 5. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
MANDSCR	72	.7882	.9843	.909717	.0382874
JADK	72	2	9	5.319	1.8752
JAKA	72	3	6	3.958	1.0934
KM	72	.00004	.28235	.0154583	.05318621
KI	72	.25911	.99960	.7004788	.19298982
Valid N (listwise)	72				

Lampiran 6. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.932	.023		41,375	.000		
JADK	.008	.002	.410	3,747	.000	.836	1,196
JAKA	.012	.004	.331	3,150	.002	.909	1,101
KM	.304	.083	.423	3,677	.000	.758	1,319
KI	.024	.024	.120	1,009	.316	.706	1,417

a. Dependent Variable: MANDSCR

Lampiran 7. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			Unstandardized Residual
N			72
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		.0000000
	Std. Deviation		.03138328
Most Extreme Differences	Absolute		.100
	Positive		.066
	Negative		-.100
Kolmogorov-Smirnov Z			.845
Asymp. Sig. (2-tailed)			.473

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Lampiran 8. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,573 ^a	,328	,288	,0323065	1,957

a. Predictors: (Constant), KI, JAKA, JADK, KM

b. Dependent Variable: MANDSCR

Lampiran 9. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	KI, JAKA ^a JADK, KM	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: ABS_RES1

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,185 ^a	,034	-,023	,11937257

a. Predictors: (Constant), KI, JAKA, JADK, KM

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,034	4	,008	,594	,668 ^a
	Residual	,955	67	,014		
	Total	,989	71			

a. Predictors: (Constant), KI, JAKA, JADK, KM

b. Dependent Variable: ABS_RES1

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,156	,083		1,877	,065
	JADK	-,001	,008	-,017	-,127	,900
	JAKA	-,017	,014	-,161	-1,276	,206
	KM	-,226	,306	-,102	-,740	,462
	KI	-,060	,087	-,098	-,683	,497

a. Dependent Variable: ABS_RES1

Lampiran 10. Hasil Uji T

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	,932	,023		41,375	,000		
	JADK	,008	,002	,410	3,747	,000	,836	1,196
	JAKA	,012	,004	,331	3,150	,002	,909	1,101
	KM	,304	,083	,423	3,677	,000	,758	1,319
	KI	,024	,024	,120	1,009	,316	,706	1,417

a. Dependent Variable: MANDSCR

Lampiran 11. Hasil Uji F

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,034	4	,009	8,180	,000 ^a
	Residual	,070	67	,001		
	Total	,104	71			

a. Predictors: (Constant), KI, JAKA, JADK, KM

b. Dependent Variable: MANDSCR

Lampiran 12. Hasil Uji Koefisien (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,573 ^a	,328	,288	,0323065	1,957

a. Predictors: (Constant), KI, JAKA, JADK, KM

b. Dependent Variable: MANDSCR

Lampiran 13. Daftar Item Checklist BAPEPAM

Kriteria	Penjelasan
I. UMUM	
1. Laporan tahunan disajikan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan menyajikan juga dalam bahasa Inggris.	
2. Laporan tahunan dicetak dengan kualitas yang baik dan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca.	
3. Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas	Nama Perusahaan dan Tahun Annual Report ditampilkan di: 1. Sampul muka; 2. Samping; 3. Sampul belakang; dan 4. Setiap halaman
4. Laporan tahunan ditampilkan di website Perusahaan	
II. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	
1. Informasi hasil usaha perusahaan dalam bentuk perbandingan selama (lima) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 5 (lima) tahun	Informasi memuat antara lain: 1. Penjualan/pendapatan usaha 2. Laba bruto 3. Laba (rugi) 4. Total laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali 5. Total laba (rugi) komprehensif 6. Laba (rugi) per saham 7. Jumlah aset 8. Jumlah liabilitas 9. Jumlah ekuitas 10. Rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset 11. Rasio laba (rugi)

	12. Rasio lancar 13. Rasio liabilitas terhadap ekuitas 14. Rasio liabilitas terhadap jumlah aset, dan 15. Informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan perusahaan dan jenis industrinya
2. Informasi posisi keuangan perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 5 (lima) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 5 (lima) tahun	Informasi memuat antara lain: 1. Modal kerja bersih 2. Jumlah investasi pada entitas lain 3. Jumlah aset 4. Jumlah liabilitas 5. Jumlah ekuitas
3. Rasio keuangan dalam bentuk perbandingan selama 5 (lima) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 5 (lima) tahun	Informasi memuat 5 (lima) rasio keuangan yang umum dan relevan dengan industri perusahaan
4. Informasi harga saham dalam bentuk tabel dan grafik.	Informasi dalam bentuk tabel dan grafik yang memuat: 1. Harga saham tertinggi, 2. Harga saham terendah, 3. Harga saham penutupan, 4. Volume saham yang diperdagangkan untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir (jika ada).
5. Informasi mengenai obligasi, sukuk atau obligasi konvertibel yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun buku terakhir	Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (outstanding) 2. Tingkat bunga/imbalan 3. Tanggal jatuh tempo 4. Peringkat obligasi/sukuk

III. LAPORAN DEWAN KOMISARIS	
1. Laporan Dewan Komisaris	<p>Memuat hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian atas kinerja Direksi mengenai pengelolaan perusahaan 2. Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi. 3. Komite-komite yang berada dibawah pengawasan Dewan Komisaris. 4. Perubahan komposisi Dewan Komisaris (jika ada)
2. Laporan Direksi	<p>Memuat hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis atas kinerja perusahaan misalnya kebijakan strategis, perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan, dan kendala-kendala yang dihadapi perusahaan. 2. Prospek usaha 3. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik yang telah dilaksanakan oleh perusahaan 4. Perubahan komposisi Direksi (jika ada).
3. Tanda tangan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	<p>Memuat hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri 2. Pernyataan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris bertanggungjawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan. 3. Ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya 4. Penjelasan tertulis dalam surat terdiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat dewan komisaris atau direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan
IV. PROFIL PERUSAHAAN	

1. Nama dan alamat lengkap perusahaan	Informasi memuat antara lain nama dan alamat, kode pos, no. Telp, no. Fax, email, dan website
2. Riwayat singkat perusahaan	Mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama, dan perubahan nama perusahaan (jika ada)
3. Bidang Usaha	Uraian mengenai antara lain: 1. Bidang usaha yang dijalankan sesuai dengan anggaran dasar yang telah ditetapkan; dan 2. Penjelasan mengenai produk dan atau jasa yang dihasilkan
4. Struktur Organisasi	Dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan
5. Visi dan Misi Perusahaan	Mencakup: 1. Visi dan misi perusahaan; dan 2. Keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah disetujui oleh Direksi/Dewan Komisaris
6. Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris	Informasi memuat antara lain: 1. Nama 2. Jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain) 3. Umur 4. Pendidikan 5. Pengalaman kerja 6. Tanggal penunjukan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris
7. Identitas riwayat singkat anggota direksi	Informasi memuat antara lain: 1. Nama 2. Jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain) 3. Umur 4. Pendidikan 5. Pengalaman kerja 6. Tanggal penunjukan pertama kali sebagai anggota Direksi

8. Jumlah karyawan (komparatif 2 tahun) dan deskripsi pengembangan kompetensinya (misal: aspek pendidikan dan pelatihan karyawan)	<p>Informasi memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah karyawan untuk masing-masing level organisasi 2. Jumlah karyawan untuk masing-masing tingkat pendidikan 3. Pelatihan karyawan yang telah dilakukan dengan mencerminkan adanya persamaan kesempatan kepada seluruh karyawan 4. Biaya yang telah dikeluarkan
9. Komposisi pemegang saham	<p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham 2. Nama direktur dan komisaris yang memiliki saham 3. Kelompok pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5% dan persentase kepemilikannya
10. Daftar entitas anak dan/atau entitas asosiasi	<p>Informasi memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama entitas anak/asosiasi 2. Persentase kepemilikan saham 3. Keterangan tentang bidang usaha entitas anak atau entitas asosiasi 4. Keterangan status operasi entitas anak atau entitas asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi)
11. Kronologis pencatatan saham	<p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kronologis pencatatan saham 2. Jenis tindakan korporasi (corporate action) yang menyebabkan perubahan jumlah saham 3. Perubahan jumlah saham dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku dalam bentuk skema atau diagram 4. Nama bursa dimana saham perusahaan dicatatkan

12. Kronologis pencatatan Efek lainnya	Mencakup antara lain: 1. Kronologis pencatatan Efek lainnya 2. Jenis tindakan korporasi (corporate action) yang menyebabkan perubahan jumlah Efek lainnya 3. Perubahan jumlah Efek lainnya dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku 4. Nama Bursa dimana Efek lainnya perusahaan dicatatkan 5. Peringkat Efek
13. Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal	Informasi memuat antara lain: 1. Nama dan alamat BAE 2. Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik 3. Nama dan alamat Perusahaan Pemeringkat Efek
14. Penghargaan dan atau sertifikasi yang diterima perusahaan baik yang berskala nasional maupun internasional	Informasi memuat antara lain: 1. Nama penghargaan dan atau sertifikat 2. Tahun perolehan 3. Badan pemberi penghargaan dan atau sertifikat 4. Masa berlaku (untuk sertifikasi)
15. Nama dan alamat entitas anak dan atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada)	
V. ANALISI DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN	
1. Tinjauan operasi per segmen usaha	Memuat uraian mengenai: 1. Produksi/kegiatan usaha; 2. Peningkatan/penurunan kapasitas produksi; 3. Penjualan/pendapatan usaha;

	4. Profitabilitas untuk masing-masing segmen usaha yang diungkapkan dalam laporan keuangan (jika ada)
2. Uraian atas kinerja keuangan perusahaan	Memuat antara lain : 1. Aset lancar, aset tidak lancar, dan jumlah aset; 2. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas; 3. Penjualan/pendapatan usaha, beban dan laba (rugi); 4. Pendapatan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif 5. Arus kas
3. Bahasa dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan	Penjelasan tentang: 1. Kemampuan membayar utang, baik jangka pendek maupun jangka panjang 2. Tingkat kolektibilitas piutang
4. Bahasa tentang struktur modal, dan kebijakan manajemen atas struktur modal	Penjelasan atas: 1. Struktur modal (capital structure), 2. Kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policy),
5. Bahasa mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal	Penjelasan tentang: 1. Tujuan dari ikatan tersebut 2. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut 3. Mata uang yang menjadi denominasi 4. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait
6. Jika laporan keuangan mengungkapkan peningkatan atau penurunan yang material dari penjualan/pendapatan bersih, maka berikan bahasan tentang sejauh mana perubahan tersebut dapat dikaitkan dengan jumlah barang atau jasa yang	Penjelasan mengenai: 1. Besaran peningkatan/penurunan penjualan atau pendapatan bersih 2. Faktor penyebab peningkatan/penurunan material dari penjualan atau pendapatan bersih yang dikaitkan dengan jumlah barang atau

dijual, dan atau adanya produk atau jasa baru	jasa yang dijual, dan atau adanya produksi atau jasa baru
7. Bahasan tentang dampak perubahan harga terhadap penjualan/ pendapatan bersih perusahaan serta laba perusahaan selama 2 (dua) tahun atau sejak perusahaan memulai usahanya, jika baru memulai usahanya kurang dari 2 (dua) tahun	Ada atau tidak ada pengungkapan
8. Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan	Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang
9. Uraian tentang prospek usaha perusahaan	Uraian mengenai prospek perusahaan dikaitkan dengan industry dan ekonomi secara umum disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya
10. Uraian tentang aspek pemasaran	Uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan/atau jasa perusahaan, antara lain strategi pemasaran dan pangsa pasar
11. Uraian mengenai kebijakan dividen dan jumlah dividen kas per saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir	Memuat uraian mengenai: 1. Jumlah dividen 2. Jumlah dividen per saham 3. Payout ratio untuk masing-masing tahun
12. Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana)	Memuat uraian mengenai: 1. Total perolehan dana, 2. Rencana penggunaan dana, 3. Rincian penggunaan dana, 4. Saldo dana, dan 5. Tanggal persetujuan RUPS atas perubahan penggunaan dana (jika ada)
13. Informasi material mengenai investasi, ekspansi, divestasi,	Memuat uraian mengenai: 1. Tujuan dilakukannya transaksi;

akuisisi atau restrukturisasi utang/modal.	2. Nilai transaksi atau jumlah yg direstrukturisasi; 3. Sumber dana. Catatan: apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan
14. Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi.	Memuat uraian mengenai: 1. Nama pihak yang bertransaksi dan sifat hubungan afiliasi; 2. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi; 3. Alasan dilakukannya transaksi; 4. Realisasi transaksi pada periode berjalan; 5. Kebijakan perusahaan terkait dengan mekanisme review atas transaksi; 6. Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait Catatan: apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan
15. Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap perusahaan	Uraian memuat antara lain: perubahan peraturan perundangundangan dan dampaknya terhadap perusahaan
16. Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi	Uraian memuat antara lain: perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan
VI. GOOD CORPORATE GOVERNANCE	
1. Uraian Dewan Komisaris	Uraian memuat antara lain: 1. Uraian tanggung jawab Dewan Komisaris 2. Pengungkapan prosedur penetapan remunerasi 3. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Dewan Komisaris

	<p>4. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam pertemuan</p> <p>5. Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Dewan Komisaris</p>
2. Uraian Direksi	<p>Uraian memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi. 2. Frekuensi pertemuan 3. Tingkat kehadiran anggota Direksi dalam pertemuan 4. Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi 5. Keputusan RUPS tahun sebelumnya dan realisasinya pada tahun buku, serta alasan dalam hal terdapat keputusan yang belum direalisasikan, dan 6. Pengungkapan kebijakan perusahaan tentang penilaian terhadap kinerja anggota Direksi (jika ada)
3. Assessment terhadap anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi	<p>Uraian mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pelaksanaan assessment atas kinerja anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi 2. Kriteria yang digunakan dalam pelaksanaan assessment atas kinerja anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi 3. Pihak yang melakukan assessment
4. Uraian mengenai kebijakan remunerasi bagi Direksi	<p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengungkapan prosedur penetapan remunerasi 2. Struktur remunerasi yang menunjukkan jenis dan jumlah imbalan jangka pendek dan jangka panjang/pasca kerja untuk setiap anggota Direksi 3. Indikator kinerja untuk mengukur performance Direksi
5. Komite Audit	<p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama dan jabatan anggota komite audit

	2. Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja anggota komite audit 3. Independensi anggota komite audit 4. Uraian tugas dan tanggung jawab 5. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan komite audit 6. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite audit
6. Komite Nominasi	Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite nominasi 2. Independensi anggota komite nominasi 3. Uraian tugas dan tanggung jawab 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite nominasi 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite nominasi
7. Komite Remunerasi	Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite remunerasi 2. Independensi anggota komite remunerasi 3. Uraian tugas dan tanggung jawab 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite remunerasi 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite remunerasi
8. Komite-komite lain di bawah Dewan Komisaris yang dimiliki oleh perusahaan	Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite lain 2. Independensi anggota komite lain 3. Uraian tugas dan tanggung jawab. 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite lain 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite lain
9. Uraian tugas dan fungsi Sekretaris Perusahaan	Mencakup antara lain: 1. Nama dan riwayat jabatan singkat sekretaris 2. Pendidikan 3. Periode jabatan sekretaris perusahaan

	4. Uraian pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan
10. Uraian mengenai unit audit internal	<p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama ketua unit audit internal 2. Jumlah pegawai pada unit audit internal 3. Kualifikasi/sertifikasi sebagai profesi audit internal 4. Struktur atau kedudukan unit audit internal 5. Uraian pelaksanaan tugas 6. Pihak yang mengangkat/memberhentikan ketua unit audit internal
11. Akuntan Perseroan	<p>Informasi memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah periode akuntan telah melakukan audit laporan keuangan tahunan perusahaan 2. Jumlah periode Kantor Akuntan Publik telah melakukan audit laporan keuangan tahunan perusahaan 3. Besarnya fee audit dan jasa attestasi lainnya (dalam hal akuntan memberikan jasa attestasi lainnya bersamaan \ dengan audit) 4. Jasa lain yang diberikan akuntan selain jasa financial audit
12. Uraian mengenai manajemen risiko perusahaan	<p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan mengenai sistem manajemen risiko 2. Penjelasan mengenai evaluasi yang dilakukan atas efektivitas sistem manajemen risiko 3. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan 4. Upaya untuk mengelola risiko tersebut
13. Uraian mengenai sistem pengendalian intern	<p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan singkat mengenai system pengendalian intern 2. Penjelasan mengenai evaluasi yang dilakukan atas efektivitas sistem pengendalian intern

14. Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan lingkungan hidup	Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Kebijakan, 2. Kegiatan yang dilakukan, dan 3. Dampak keuangan dari kegiatan terkait program lingkungan hidup, seperti penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengolahan limbah perusahaan, dan lain-lain 4. Sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki
15. Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja	Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Kebijakan, 2. Kegiatan yang dilakukan dan 3. Dampak keuangan dari kegiatan terkait praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, seperti kesetaraan gender dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat turnover karyawan, tingkat kecelakaan kerja, pelatihan, dan lain-lain
16. Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan pengembangan sosial dan kemasyarakatan	Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Kebijakan, 2. Kegiatan yang dilakukan, dan 3. Dampak keuangan dari kegiatan terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan, seperti penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya, dan lain-lain
17. Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen	Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Kebijakan, 2. Kegiatan yang dilakukan, dan 3. Dampak keuangan dari kegiatan terkait tanggung jawab produk, seperti kesehatan dan keselamatan konsumen, informasi produk, sarana, jumlah dan penanggulangan atas pengaduan konsumen, dan lain-lain
18. Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas	Mencakup antara lain: 1. Pokok perkara/gugatan

anak, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada periode laporan tahunan	2. Status penyelesaian perkara/gugatan 3. Pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan
19. Akses informasi dan data perusahaan	Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui website, media massa, mailing list, buletin, pertemuan dengan analis, dan sebagainya
20. Bahasan mengenai kode etik	Memuat uraian antara lain: 1. Keberadaan kode etik 2. Isi kode etik 3. Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh level organisasi 4. Upaya dalam penerapan dan penegakannya 5. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (corporate culture) yang dimiliki perusahaan
21. Pengungkapan mengenai whistleblowing system	Memuat uraian tentang mekanisme whistleblowing system antara lain: 1. Penyampaian laporan pelanggaran 2. Perlindungan bagi whistleblower 3. Penanganan pengaduan 4. Pihak yang mengelola pengaduan.
VII. INFORMASI KEUANGAN	
1. Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan	Kesesuaian dengan peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.11 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan
2. Opini auditor independen atas laporan keuangan	
3. Deskripsi auditor independen di opini	Deskripsi memuat tentang: 1. Nama & tanda tangan 2. Tanggal Laporan Audit 3. No. ijin KAP dan nomor ijin Akuntan Publik
4. Laporan keuangan yang lengkap	Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan: 1. Laporan posisi keuangan (neraca) 2. Laporan laba rugi komprehensif

	3. Laporan perubahan ekuitas 4. Laporan arus kas 5. Catatan atas laporan keuangan 6. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya (jika relevan)
5. Pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos pos dalam laporan keuangannya	Ada atau tidak ada pengungkapan sesuai dengan PSAK
6. Perbandingan tingkat profitabilitas	Perbandingan laba (rugi) tahun berjalan dengan tahun sebelumnya
7. Laporan arus kas	Memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: operasi, investasi, dan pendanaan 2. Penggunaan metode langsung (direct method) untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi 3. Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan atau pengeluaran kas selama tahun berjalan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan 4. Pengungkapan transaksi non kas dalam catatan atas laporan Keuangan
8. Ikhtisar kebijakan akuntansi	Meliputi sekurang-kurangnya: 1. Pernyataan kepatuhan terhadap SAK 2. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan 3. Pengakuan pendapatan dan beban 4. Aset Tetap 5. Instrumen Keuangan

9. Pengungkapan transaksi pihak berelasi	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi 2. Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait 3. Jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas 4. Syarat dan ketentuan transaksi dengan pihak berelasi
10. Pengungkapan yang berhubungan dengan Perpajakan	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi 2. Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini 3. Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan. 4. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan. 5. Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak
11. Pengungkapan yang berhubungan dengan Aset Tetap	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Metode penyusutan yang digunakan 2. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model nilai wajar dan model biaya 3. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset tetap (model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar aset tetap (model biaya)

	4.Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan: penambahan, pengurangan dan reklasifikasi.
12. Perkembangan Terakhir Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan Lainnya	<p>Uraian mengenai SAK/peraturan yang telah diterbitkan tetapi belum berlaku efektif, yang belum diterapkan oleh perusahaan, dengan mengungkapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis dan tanggal efektif SAK/peraturan baru tersebut; 2. Sifat dari perubahan yang belum berlaku efektif atau perubahan kebijakan akuntansi; dan 3. Dampak penerapan awal SAK dan peraturan baru tersebut atas laporan keuangan.
13. Pengungkapan yang berhubungan dengan Instrumen Keuangan	<p>Hal-hal yang harus diungkapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan, kondisi dan kebijakan akuntansi untuk setiap kelompok instrumen keuangan 2. Klasifikasi instrumen keuangan 3. Nilai wajar tiap kelompok instrumen keuangan 4. Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas 5. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangannya
14. Penerbitan laporan keuangan	<p>Hal-hal yang diungkapkan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit; dan 2. Pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan